|  |
| --- |
| **C:\Users\Universal\Pictures\_1Rd-nCI.jpg**  **C:\Users\Universal\Pictures\kg.jpg** |

****

****

Jalan Bung Hatta

Komlpel Kemutar Telu Center ( KTC)

**KATA PENGANTAR**

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena curahan nikmat dan karunia kepada kita semua sehingga kita masih terus bisa bekerja dan berkarya untuk kemajuan Kabupaten Sumbawa Barat. Dan kami bersyukur pula bahwa dengan kasih sayang-Nya, kami bisa menyusun salah satu dokumen penting perencanaan pembangunan di Satuan Kerja kami, yaitu Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai acuan atau panduan kerja. Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2017–2021 merupakan bagian integral dari Program Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat yang disusun berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Strategis periode sebelumnya dengan memperhatikan permasalahan permasalahan kunci di daerah, isu-isu strategis pembangunan, capaian kinerja tahun sebelumnya dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2020 Kabupaten Sumbawa Barat, sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan visi Kabupaten Sumbawa Barat serta misi pembangunan.

Besar harapan kami bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika bisa membantu mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat melalui program-program yang telah disusun.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Sumbawa Barat

Drs. BURHANUDDDIN, M.M

NIP. 19641212 198903 1 028

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang**

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) saat ini telah menjadi fasilitas utama di berbagai sektor kehidupan masyarakat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kebutuhan dan aktivitas manusia sehari-hari. Peran Teknologi Informasi dan Komunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung telah mengubah cara kita hidup, cara kita belajar, cara kita bekerja dan cara kita bermain. Seiring dengan perkembangan TIK yang begitu pesat, mendorong berbagai kota di belahan dunia untuk menciptakan berbagai peluang dan industri TIK sebagai salah satu bentuk indikator peradaban masyarakat yang maju. Bahkan pemanfaatan dan perkembangan industri TIK diyakini dapat berperan sebagai penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan.

Perkembangan TIK pada dasawarsa ini telah memunculkan sebuah babak baru yang dikenal dengan istilah *Cyber Regency*, yang lebih mengedepankan pada layanan publik berbasis teknologi informasi dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Ada 3 ( tiga ) hal yang mendasari perwujudan *cyber regency*, yaitu: *cyber* *infrastructure*, *cyber application* dan *cyber content*, yang meliputi di sektor pemerintah, publik dan komunitas. Untuk akselerasi realisasi *cyber regency*, diperlukan peran pemerintah dalam penyediaan sarana dan prasarana bagi pengembangan komunitas TIK sebagai mitra untuk implementasi layanan pemerintahan kepada publik berbasis TIK. Trend *cyber regency* ini dapat memicu pertumbuhan ekonomi di sektor jasa, dengan mengandalkan masyarakat berbasis pengetahuan digital dan memberikan kesempatan seluasluasnya kepada semua komunitas untuk pengembangan diri melalui sarana dan saluran komunikasi yang tersedia. Diperkirakan di masa mendatang, *cyber* *regency* ini dapat mewarnai tingkat kemajuan masyarakat kabupaten Sumbawa Barat yang dilandasi pada digitalisasi informasi melalui komunikasi lancar dan informasi benar.

**1.2 Landasan Hukum**

1. Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat, peraturan perundang undangan yang dipergunakan sebagai rujukan adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2011-2031;
20. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016-2021;
22. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016-2021.

**1.3 Maksud dan Tujuan**

A) Maksud

Rencana strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2017 - 2021 ini disusun dengan maksud sebagai pedoman dan arah kebijakan implementasi cyber regency berbasis komunitas, yang memprioritaskan layanan public berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Pedoman renstra ini

memuat pula tahapan dan indikator kinerja program dan kegiatan pada setiap tahunnya untuk memastikan perwujudan visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika dapat terealisasi lebih cepat dan berkualitas.

B) Tujuan

Rencana strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2017 - 2021 disusun dengan tujuan untuk memberikan landasan pemerintah dalam melakukan sinergi dengan komunitas TIK dalam menjawab tantangan dan permasalahan yang ada di masyarakat secara responsif, sebagai upaya

pertanggungjawaban layanan publik yang profesional berbasis TIK.

**1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan Rancangan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

2.1 Tugas , Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

2.2 Sumber Daya SKPD

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Propinsi

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

4.3 Strategi dan Kebijakan

BAB V TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB VII INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VIII PENUTUP

**BAB II**

**GAMBARAN PELAYANAN**

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

1. **Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**
2. **Tugas pokok dan Fungsi**

Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Sumbawa BaratNomor : 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokokdan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat adalah sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup dan tugasnya;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya
6. **Struktur organisasi**

Sesuai dengan peraturan Bupati Sumbawa BaratNomor : 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokokdan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat Struktur sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Dinas menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika;

b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang komunikasi dan informatika;

d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

1. Sekretaris Dinas

Rincian tugas Sekretaris Dinas adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang umum dan kepegawaian, keuangan dan perencanaan
2. Memverifikasi bahan kebijakan umum dan kepegawaian, keuangan dan perencanaan
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan bidang umum dan kepegawaian, keuangan dan perencanaan
4. Mempromosikan pelaksanaan program dan kegiatan bidang umum dan kepegawaian, keuangan dan perencanaan
5. Memimpin pelaksanaan program dan kegiatan bidang umum dan kepegawaian, keuangan dan perencanaan
6. Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang umum dan kepegawaian, keuangan dan perencanaan
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris dinas di bantu 2 (dua) Kasubbag :

1. Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Rincian tugas kepala Subbagian umum dan kepegawaian adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan penyusunan program dan rencana kerja subbagian Umum dan Kepegawaian
2. Melaksanakan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat, penyiapan rapat-rapat Dinas dan pendokumentasian kegiatan Dinas
3. Melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas
4. Melaksanakan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan dan kebersihan di lingkungan kerja
5. Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas, peralatan dan perlengkapan kantor dan asset lainnya
6. Melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Dinas
7. Melaksanakan pengurusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi barang barang inventaris
8. Melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran
9. Melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan pemeliharaan data dan kartu kepegawaian di lingkungan dinas
10. Melaksanakan penyiapan dan pengusulan pegawai yang akan pension, serta pemberian penghargaan
11. Melaksakan penyiapan bahan kenaikan pangkat, daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai, daftar urut kepangkatan, sumpah/janji pegawai, gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai
12. Melaksanakan penyiapan pegawai untuk mengukiti pendidikan /pelatihan kepemimpinan, teknis dan fungsional
13. Melaksanakn penyiapan rencana pegawai yang akan mengikuti ujian dinas
14. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai
15. Melaksanakan penyiapan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional
16. Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas subbagian umum dan kepegawaian
17. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan
18. Melaksankan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya
19. Kasubbag Koordinasi Penyusunan Program dan keuangan

Rincian tugas kasubbag koordinasi penyusunan program dan keuangan

1. Melaksnakan penyusunan program dan rencana kerja Subbagian koordinasi penyusunan program dan keuangan
2. merencanakan bahan kebijakan bidang koordinasi penyusunan program dan Keuangan
3. merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang dan menganalisis bahan kebijakan bidang koordinasi penyusunan program dan Keuangan
4. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis dinas
5. mengumpulkan bahan-bahan dalam penyusunan program dan kegiatan dinas
6. melaksanakan pengolahan data dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan dinas
7. melaksanakan pengelolaan data dan informasi
8. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan meliputi belanja rutin maupun pegawai
9. melaksanakan penyusunan prognosis realisasi keuangan
10. melaksanakan penyusunan laporan keuangan semesteran
11. melaksanakan penyusunan laporan keuangan akhir tahun
12. Melaksakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung
13. Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas subbagian koordinasi penyusunan program dan keuangan
14. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan
15. Melaksanakn tugas-tugas lain yang dberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
16. Kepala Bidang Komunikasi Dan Informatika

Rincian tugas kepala bidang komunikasi dan informatika

1. Merumuskan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika
2. Memverifikasi bahan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika
3. Mengkoordinasikan bahan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika
4. Mempromosikan bahan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika
5. Memimpin pelaksanaan kegiatan teknis bidang komunikasi dan informatika
6. Mongkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan bidang komunikasi dan informatika
7. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan
8. Melaksnakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuain dengan tugas dan fungsinya.

Kepala bidang Kominfo dibantu 2 (dua) Kepala Seksi

* 1. Kepala Seksi Komunikasi

1. Menyusun program dan rencana kerja seksi komunikasi
2. Menyusun bahan kebijakan teknis komunikasi publik
3. Merencanakan bahan kebijakan teknis komunikasi publik
4. Merancang bahan kebijakan teknis komunikasi publik
5. Mengembangkan bahan kebijakan teknis komunikasi publik
6. Membuat konsep bahan kebijakan teknis komunikasi publik
7. Mengkaji ulang bahan kebijakan teknis komunikasi publik
8. Menganalisis bahan kebijakan teknis komunikasi publik
9. Menyelenggarakan pelayanan pos di pedesaan
10. Menyiapkan bahan pemberian rekomendasi untuk pendirian kantor pusat jasa titipan dan pemberian izin serta menertibkan jasa titipan untuk kantor agen
11. Melaksanakan pengendalian dan penertiban terhadap pelanggaran standarisasi pos dan telekomunikasi
12. Menyiapkan bahan pemberian rekomendasi iizin penyelenggara telekomunikasi khusus keperluan pemerintah dan badan hokum serta usaha perdagangan alat perangkat komunikasi dalam cakupan wilayah kabupaten
13. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
    1. Kepala Seksi Informatika

Rincian tugas kepala seksi informatika

1. Menyusun program dan rencana kerja seksi informatika
2. Menyusun bahan kebijakan teknis informatika
3. Merencanakan bahan kebijakan teknis informatika
4. Merancang bahan kebijakan teknis informatika
5. Mengembangkan bahan kebijakan teknis informatika
6. Melaksakan desiminasi informasi nasional
7. Melaksanakan pengelolahan website pemerintah daerah
8. Melaksanakan penerapan dan koordinasi pengembangan teknologi pengelolaan data elektronik
9. Mengembangkan layanan monitoring isu publik di media massa/media sosial
10. Mengembangkan kegiatan penyedian bahan komunikasi bagi pimpnan daerah meliputi briefing notes, press release, dan backgrounders
11. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
12. Kepala Bidang Statistik dan Persandian

Rincian tugas kepala bidang statistik dan persandian

1. Merumuskan kebijakan teknis bidang statistik dan persandian
2. Memverifikasi bahan kebijakan teknis bidang statistik dan persandian
3. Mengkoordinasikan bahan kebijakan teknis bidang statistik dan persandian
4. Mempromosikan bahan kebijakan teknis bidang statistik dan persandian
5. Memimpin pelaksanaan kegiatan teknis bidang statistik dan persandian
6. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan bidang statistik dan persandian
7. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan
8. Melaksnakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala bidang statistik dan persandian dibantu 2 (dua) kepala seksi

1. Kepala Seksi Statistik

Rincian tugas kepala seksi statistik

1. Menyusun program dan rencana kerja seksi statistik
2. Menyusun bahan kebijakan teknis statistik
3. Merencanakan bahan kebijakan teknis statistik
4. Merancang bahan kebijakan teknis statistik
5. Melakukan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data statistik
6. Melakukan penerapan dan pengembangan teknologi pengelolaan data elektronik
7. Menyelenggarakan komplikasi, integrasi dan penyajian data informasi
8. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan
9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
10. Kepala Seksi Persandian

Rincian tugas kepala seksi persandian

* + - 1. Menyusun program dan rencana kerja seksi persandian
      2. Munyusun bahan kebijakan teknis persandian
      3. Merencanakan bahan kebijakan teknis persandian
      4. Merancang bahan kebijakan teknis persandian
      5. Mengembangkan bahan kebijakan teknis persandian
      6. Menganalisis bahan kebijakan teknis persandian
      7. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pembinaan peralatan sandi, pembinaan sistem sandi, pembinaan kelembagaan, pengawasan dan pengendalian
      8. Melaksanakan pengamanan informasi pada unit pembantu pimpinan perangkat daerah lainnya
      9. Melaksanakan penerapan dan pengkoordinasian pengembangan teknologi persandian
      10. Melaksanakan pengamanan dan pemeliharaan peralatan sandi, system/kunci sandi dan material sandi
      11. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**2.1.3 Tujuan dan Sasaran Program/Kegiatan**

A. Sekretariat

1. Sub bagian Umum Kepegawaian

* **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**
* Kegiatan :

1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2. Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran

* Tujuan : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
* Sasaran : Dinas Komunikasi dan Informatika
* **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**
* Kegiatan :

1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
3. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Gedung Kantor

* Tujuan : Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai
* Sasaran : Dinas Komunikasi dan Informatika
* **Program Pendataan Sistem Administrasi Arsip Kepegawaian**
* Kegiatan :

1. Pendataan dan penataan dokumen/arsip kepegawaian

* Tujuan : Tertatanya Sistem Administrasi Arsip Kepegawaian
* Sasaran : Dinas Komunikasi dan Informatika

1. Sub bagian Koordinasi Penyusunan Program dan Keuangan

* **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**
* Kegiatan :

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
3. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

* Tujuan : Meningkatnya kualitas dan kuantitas Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
* Sasaran : Dinas Komunikasi dan Informatika
* **Program Peningkatan Sistem Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan**
* Kegiatan :

1. Penyusunan Rencana Kerja SKPD
2. Penyusunan RKA/RKPA dan DPA/ DPPA SKPD

* Tujuan : Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan pengelolaan Keuangan Dinas
* Sasaran : Dinas Komunikasi dan Informatika
  + 1. Bidang Komunikasi dan Informatika

1. Seksi Komunikasi

* **Program Pengembangan Komunikasi Publik**
* Kegiatan :

1. Peningkatan kapasitas pelaku Informatika
2. Penguatan Kelompok Informasi Masyarakat
3. Sosialisasi dan Desiminasi Informasi Daerah

* Tujuan : Terlaksananya Pengembangan Komunikasi Publik
* Sasaran : Terbinannya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) pada seluruh desa

1. Seksi Informatika

* **Program Pembuatan Tata Kelola SPBE**
* Kegiatan :

1. Pembuatan Peraturan Bupati tentang tata kelola SPBE

* Tujuan : Terlaksananya pembuatan tat kelola SPBE
* Sasaran : Terbentuknya Peraturan tentang tata kelola SPBE
* **Program Optimalisasi penggunaan jaringan pita lebar**
* Kegiatan :

1. Pelatihan pemakaian jaringan serat optic di lingkungan perkantoran

* Tujuan : Terlaksananya Optimalisai penggunaan jaringan pita lebar
* Sasaran : Terpakainya jaringan serat optic di lingkungan perkantoran KTC
* **Program pengembangan aplikasi informatika terintegrasi**
* Kegiatan :

1. Integrasi aplikasi OPD dan Desa

* Tujuan : Terlaksananya Pengembangan aplikasi informatika terintegrasi
* Sasaran : Terintegrasinya semua aplikasi dan berbagi pakai antar OPD dan Desa
* **Program Optimalisasi pemakiaan sarana Teknologi dan Informatika**
* Kegiatan :

1. Bimbingan Teknis Pemanfaatan perangkat IT untuk pelayanan Administrasi dan pelayanan Publik

* Tujuan : Terlaksananya Optimalisasi pemakaian sarana teknologi dan informatika
* Sasaran : Meningkatnya pemakaiaan IT di OPD dan Desa
* **Program Pengadaan Taman Pintar Digital**
* Kegiatan :
  + - 1. Pembangunan ekosistem telekomunikasi
* Tujuan : Terlaksananya Pengadaan Taman Pintar Digital
* Sasaran : Terbangunya WIFI bebas bayar di lokasi public
  + 1. Bidang Statistik dan Persandian
       1. Seksi Statistik
* **Program Pengembangan Data dan Informasi Statistik Sektoral**
* Kegiatan :

1. Verifikasi Data Statistik Daerah
2. Manajemen Data dan Informasi Statistik Sektoral

* Tujuan : Terlaksananya Pengembangan data dan Informasi Statistik Daerah, Masyarakat, dan Pengguna data lainnya
* Sasaran : Meningkatnya basis data sektoral

1. Seksi persandian

* **Program Pengembangan Sistem Persandian Daerah**
* Kegiatan :

1. Manajemen sistem persandian
2. Pemakaian tandatangan elektronik
3. Pemakian QR code dan Barcode
4. Opersionalisasi jaringan komunikasi sandi OPD
5. Monev operasional jaringan komunikasi sandi
6. Fasilitas layanan keamanan informasi pemerintah daerah ( sertifikat/tandatangan elektronik)
7. Pengamanan data informasi persandian daerah
8. Kontra penginderaan
9. Jamming
10. Assesment keamanan sistem informasi( penilaiaan mandiri)
11. Penyelenggaraan Security operation center
12. Penetration testing
13. Literasi keamnan informasi pemerintah daeah dan publik
14. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah di bidang keamanan informasi
15. Peningkatan kapasitas teknologi keamanan informasi

* Tujuan : Meningkatnya kualitas keamanan data dan informasi
* Sasaran : Meningkatnya pengamanan perangkat lunak sistem persandian.

**Struktur Organisasi**

**Dinas Komunikasi dan Informatika**

**Kabupaten Sumbawa Barat**

Kepala Dinas

Drs. Burhanuddin, M.M

NIP. 19641212 198903 1 028

Sekretaris

Ahmad Zaini, ST., M.T.

NP. 19650225 199902 1 001

Jabatan Fungsional

Subbag Koordinator Penyusunan Program & Keuangan

NURAINI

NIP. 19641018 198703 2 011

Subbag. Umum dan Kepegawaian

RUSTATI, S.Kom

NIP. 19800704 200901 2 007

Bidang Statistik dan Persandian

RR. GITA KHRISHANDAYANI, SE.,M.Si

NIP. 19730929 199203 2 002

Bidang Komunikasi dan Informatika

FIRMAN DWI PUTRA,S.sos

NIP. 19760505 200501 1 017

Seksi Komunikasi

L.TEGUH SEKARDIU A.,S.AP

NIP. 19830108 200901 1 003

Seksi Persandian

ENDANG SUPRIHATI, S.KOM

NIP. 19790525 200604 2 020

Seksi Informatika

Nursyafriady, S.T., M.TI

NIP. 19830305 100901 1 006

Seksi Statistik

KHADAFI ZUBAIDI, S.KOM.

NIP.19780310 201101 1 005

1. **Sumber Daya SKPD**
2. **Sumber Daya Aparatur**

Dukungan dan komitmen pemerintah untuk melakukan perubahan mendasar dalam cara pandang terhadap permasalahan yang dihadapi daya upaya untuk mengatasinya secara partisipatif dengan menempatkan pengguna jasa perhubungan komunikasi dan informatika sebagai subyek pembangunan, sedangkan pemerintah sebagai fasilitator, dinamisator dan regulator merupakan kekuatan utama untuk mencapai keberhasilan Pembangunan. Disamping itu dengan memprioritaskan peningkatan kualitas SDM baik dari segi ekonomi, pendidikan dan kesehatan sebagai program utama pembangunan daerah

merupakan cara tepat dalam menyelesaikan persoalan mendasar.

Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat tergambar dalam susunan kepegawaian sebagai berikut : RR. GITA KHRISHANDAYANI, SE.,M.Si

NIP. 19730929 199203 2 002

**Tabel II.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Kepangkatan dan Golongan**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| no | Pendidikan | Status Kepegawaian | | | Jumlah |
| PNS | CPNS | PTT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | Juru Muda, I/a | - | - | - |  |
| 2 | Juru Muda TK.I I/b | - | - | - |  |
| 3 | Juru, I/c | - | - | - |  |
| 4 | Juru Tk.I, I/c | - | - | - |  |
| 5 | Pengatur Muda II/a | - | - | - |  |
| 6 | Pengatur muda, TK.I, II/b | 3 | - | - |  |
| 7 | Pengatur, II/c | 2 | - | - |  |
| 8 | Pengatur TK.I, II/d | 3 | - | - |  |
| 9 | Penata muda, III/a | - | - | - |  |
| 10 | Penata Muda TK.I, III/b | 1 | - | - |  |
| 11 | Penata, III/c | 1 | - | - |  |
| 12 | Penata Tk. I, III/d | 5 | - | - |  |
| 13 | Pembina, IV/a | 2 | - | - |  |
| 14 | Pembina Tk. I, IV/b | 1 | - | - |  |
| 15 | Pembina Utama Muda, IV/c | 1 | - | - |  |
| 16 | Pembina Utama Madya, IV/d | - | - | - |  |
| 17 | Pembina Utama, IV/e | - | - | - |  |
|  | Jumlah | 19 |  | 26 |  |

*Sumber : Umum dan perlengkapan Dinas Komunikasi dan Informatika KSB*

**Tabel II.2 Jumlah Pegawai Pegawai Berdasarkan Pendidikan**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Pendidikan | Status Kepegawaian | | | Jumlah |
| PNS | CPNS | PTT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | SD | - | - | 1 | 1 |
| 2 | SMP | - | - | 1 | 1 |
| 3 | SMA | 8 | - | 9 | 17 |
| 4 | D1 | - | - | - | - |
| 5 | D2 | - | - | 1 | 1 |
| 6 | D3 | 1 | - | 4 | 5 |
| 7 | D4 | - | - | - | - |
| 8 | S1 | 6 | - | 2 | 8 |
| 9 | S2 | 3 | - | - | 3 |
|  | Jumlah | 18 | - | 18 | 36 |

*Sumber : Umum dan Perlengkapan Dinas Komunikasi dan Informatika KSB*

Dari Tabel 2.1 dapat terlihat bahwa kebutuhan Pegawai di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di dukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kualitas dan kuantitas kurang memadai. Jumlah pegawai yang ada di dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat adalah 36 orang, dengan jumlah PNS 18 orang dan PTT 18 orang.

**Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat**

**Inventaris Bidang Komunikasi Dan Informatika**

Provinsi : Nusa Tenggara Barat

Kab./ Kota : Sumbawa Barat

Bidang : Komunikasi dan Informatika

Unit : Komunikasi dan Informatika

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Spesifikasi Barang** | **Asal/Cara Perolehan Barang** | **Tahun Pemblian** | **Jumlah** | |
| **Nama/ Jenis Barang** |  |  | **Banyak** | **Harga** |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Portable Generating Set | Pembelian | 2017 | 1 | 24.000.000 |
| 2 | Portable Generating Set | Hibah | 2018 | 1 | 7.700.000 |
| 3 | Station Wagon/Toyota Avanza | Pembelian | 2010 | 1 | 148.000.000 |
| 4 | Station Wagon/ Isuzu | Pembelian | 2013 | 1 | 483.677.828 |
| 5 | Sepeda Motor/ Honda WIN | Pembelian | 2004 | 1 | 9.470.500 |
| 6 | Sepeda Motor Suzuki | Pembelian | 2006 | 1 | 9.700.000 |
| 7 | Sepeda Motor Suzuki Thunder | Pembelian | 2006 | 1 | 14.850.000 |
| 8 | Sepeda Motor Supra | Pembelian | 2008 | 1 | 12.750.000 |
| 9 | Sepeda Motor Vario | Pembelian | 2018 | 4 | 73.800.000 |
| 10 | Global Positioning System | Pembelian | 2014 | 1 | 5.000.000 |
| 11 | Mesin Ketik | Pembelian | 2018 | 1 | 3.000.000 |
| 12 | Rak Besi/Metal | Pembelian | 2016 | 1 | 23.400.000 |
| 13 | Filling Besi/Metal | Hibah | 2004 | 1 | 862.500 |
| 14 | Filling Besi/Metal | Pembelian | 2009 | 1 | 1.500.000 |
| 15 | Filling Kayu | Pembelian | 2011 | 1 | 2.466.564 |
| 16 | Lemari Kayu | Pembelian | 2018 | 5 | 20.000.000 |
| 17 | Papan Visuil | Pembelian | 2015 | 57 | 17.100.000 |
| 18 | Papan Visuil | Pembelian | 2017 | 1 | 74.448.000 |
| 19 | Papan Visuil | Pembelian | 2017 | 1 | 134.850.000 |
| 20 | Papan Nama Instansi | Pembelian | 2017 | 1 | 5.000.000 |
| 21 | Papan Pengumuman | Pembelian | 2017 | 1 | 2.500.000 |
| 22 | Papan Pengumuman | Pembelian | 2017 | 1 | 2.500.000 |
| 23 | Papan Pengumuman | Pembelian | 2018 | 1 | 49.500.000 |
| 24 | Mesin Absensi | Pembelian | 2017 | 1 | 3.915.140 |
| 25 | Overhead Projektor/Infocus | Pembelian | 2014 | 1 | 8.000.000 |
| 26 | Overhead Projektor/View Sonic | Pembelian | 2018 | 1 | 8.900.000 |
| 27 | Overhead Projektor/Microvosion | Hibah | 2018 | 1 | 15.585.500 |
| 28 | Overhead Projektor/Nec M403HG | Hibah | 2018 | 1 | 24.960.000 |
| 29 | Rak Kayu | Pembelian | 2008 | 1 | 2.975.000 |
| 30 | Meja Kayu/Rotan | Pembelian | 2017 | 2 | 12.000.000 |
| 31 | Meja Kayu/Rotan | Pembelian | 2017 | 7 | 21.000.000 |
| 32 | Meja Kayu Rotan | Pembelian | 2017 | 1 | 12.000.000 |
| 33 | Kursi Lipat/Chitose | Pembelian | 2009 | 6 | 1.800.000 |
| 34 | Kursi Lipat | Pembelian | 2013 | 5 | 1.625.000 |
| 35 | Kursi Lipat Chitose | Pembelian | 2018 | 50 | 24.500.000 |
| 36 | Meja Biro | Pembelian | 2009 | 3 | 4.490.001 |
| 37 | Sofa/Kayu local | Pembelian | 2009 | 1 | 3.000.000 |
| 38 | Sofa | Pembelian | 2018 | 2 | 20.000.000 |
| 39 | Meublair Lainnya | Pembelian | 2017 | 1 | 100.000.000 |
| 40 | Mesin Potong Rumput | Pembelian | 2018 | 1 | 6.000.000 |
| 41 | AC Unit/Sharp | Pembelian | 2017 | 1 | 10.000.000 |
| 42 | AC Unit/Sharp | Pembelian | 2017 | 1 | 10.000.000 |
| 43 | AC Unit | Pembelian | 2017 | 1 | 10.000.000 |
| 44 | AC Unit | Pembelian | 2017 | 1 | 10.000.000 |
| 45 | AC Split | Pembelian | 2009 | 1 | 3.500.000 |
| 46 | AC Split | Pembelian | 2016 | 2 | 10.400.000 |
| 47 | AC Split/Jetcool | Pembelian | 2017 | 1 | 5.000.000 |
| 48 | Loudspeaker/Toa | Pembelian | 2015 | 1 | 3.500.000 |
| 49 | Loud Speaker/Proel EX-15P | Hibah | 2018 | 4 | 17.600.000 |
| 50 | Loudspaeker/Proel Calbe Connector | Hibah | 2018 | 1 | 8.140.000 |
| 51 | Sound System/Home Use | Pembelian | 2018 | 1 | 14.500.000 |
| 52 | Microphone/Ashley SMR-6 | Hibah | 2018 | 1 | 1.650.000 |
| 53 | Microphone/Proel | Hibah | 2018 | 1 | 1.980.000 |
| 54 | Microphone Floor Stand | Hibah | 2018 | 4 | 2.200.000 |
| 55 | Tustel | Pembelian | 2011 | 1 | 6.000.000 |
| 56 | Tustel | Pembelian | 2013 | 1 | 9.810.000 |
| 57 | Alat Rumah Tangga Lain-lain | Pembelian | 2017 | 1 | 10.000.000 |
| 58 | Alat Rumah Tangga Lain-lain | Pembelian | 2018 | 1 | 25.000.000 |
| 59 | Internet | Pembelian | 2018 | 1 | 1.777.947.000 |
| 60 | P.C Unit/Acer | Pembelian | 2014 | 1 | 9.800.000 |
| 61 | P.C Unit/Asus | Pembelian | 2018 | 2 | 20.000.000 |
| 62 | P.C Unit/Lenovo | Pembelian | 2018 | 1 | 19.800.000 |
| 63 | Lap Top/Toshiba L40-AS101G Intel | Pembelian | 2015 | 1 | 9.500.000 |
| 64 | Laptop Toshiba | Pembelian | 2015 | 1 | 8.160.000 |
| 65 | Lap Top Asus | Pembelian | 2016 | 2 | 50.000.000 |
| 66 | Lap Top HP | Pembelian | 2016 | 1 | 10.000.000 |
| 67 | Lap Top HP | Pembelian | 2016 | 1 | 10.000.000 |
| 68 | Lap Top Asus | Pembelian | 2017 | 3 | 53.400.000 |
| 69 | Lap Top Asus | Pembelian | 2017 | 1 | 19.900.000 |
| 70 | Hard Disk | Pembelian | 2016 | 1 | 4.000.000 |
| 71 | Hard Disk | Pembelian | 2018 | 2 | 4.000.000 |
| 72 | Printer Canon | Pembelian | 2018 | 5 | 20.000.000 |
| 73 | Printer Epson | Pembelian | 2018 | 1 | 4.500.000 |
| 74 | Printer Epson LX 300 | Pembelian | 2018 | 1 | 4.000.000 |
| 75 | Printer HP | Pembelian | 2015 | 1 | 8.000.000 |
| 76 | Printer Canon Pixma MP 237 | Pembelian | 2015 | 1 | 2.000.000 |
| 77 | Printer Canon MP 237 | Pembelian | 2015 | 1 | 2.860.000 |
| 78 | Printer LX 310 | Pembelian | 2015 | 1 | 3.500.000 |
| 79 | Printer Canon Inkjet | Pembelian | 2016 | 1 | 3.500.000 |
| 80 | Printer Canon Pixma | Pembelian | 2017 | 3 | 9.000.000 |
| 81 | Peralatan Persomal Komputer | Pembelian | 2016 | 1 | 16.900.000 |
| 82 | Server HP | Pembelian | 2016 | 1 | 26.000.000 |
| 83 | Router | Pembelian | 2014 | 1 | 1.000.000 |
| 84 | Router | Pembelian | 2015 | 10 | 40.000.000 |
| 85 | Router | Pembelian | 2016 | 3 | 2.730.000 |
| 86 | Router | Pembelian | 2016 | 3 | 19.500.000 |
| 87 | Router | Pembelian | 2016 | 10 | 6.500.000 |
| 88 | Router | Pembelian | 2016 | 1 | 7.800.000 |
| 89 | Router | Pembelian | 2016 | 1 | 23.400.000 |
| 90 | Router | Pembelian | 2016 | 1 | 12.350.000 |
| 91 | Meja Kerja Pejabat Eselon III | Pembelian | 2012 | 2 | 6.000.000 |
| 92 | Meja Kerja Pejabat Lain-lain | Pembelian | 2010 | 1 | 1.500.000 |
| 93 | Meja Kerja Pejabat Lai-lain | Pembelian | 2010 | 1 | 1.500.000 |
| 94 | Meja Rapat Pejabat Lain-lain | Pembelian | 2007 | 6 | 7.479.000 |
| 95 | Meja Rapat Pejabat Lain-lain | Pembelian | 2009 | 6 | 9.360.000 |
| 96 | Kursi Kerja Pejabat Eselon II | Pembelian | 2013 | 1 | 2.500.000 |
| 97 | Kursi Kerja Pejabat Eselon II/frontline | Pembelian | 2017 | 1 | 4.000.000 |
| 98 | Kursi Kerja Pejabat Eselon III/Olympic | Pembelian | 2006 | 1 | 1.250.000 |
| 99 | Kursi Kerja Pejabat Eselon III | Pembelian | 2017 | 2 | 6.000.000 |
| 100 | Kursi Kerja Pejabat Eselon IV/Olympic | Pembelian | 2006 | 3 | 3.450.000 |
| 101 | Kursi Kerja Pejabat Eselon IV | Pembelian | 2015 | 1 | 2.000.000 |
| 102 | Kursi Kerja Pejabat Eselon IV | Pembelian | 2017 | 7 | 14.000.000 |
| 103 | Lemari Arsip untuk arsip | Pembelian | 2015 | 1 | 2.000.000 |
| 104 | Camera + Attachment | Pembelian | 2018 | 1 | 17.500.000 |
| 105 | Camera + Attachment | Pembelian | 2018 | 1 | 4.500.000 |
| 106 | Audio Amplifier | Hibah | 2018 | 1 | 5.500.000 |
| 107 | Compact Disk Player | Hibah | 2018 | 1 | 1.540.000 |
| 108 | Unintemuptible Power Supply | Pembelian | 2018 | 1 | 58.500.000 |
| 109 | Lensa Kamera | Pembelian | 2013 | 1 | 8.500.000 |
| 110 | Amplifier | Pembelian | 2015 | 1 | 6.000.000 |
| 111 | Microphone | Pembelian | 2015 | 1 | 500.000 |
| 112 | Switcher/menara antenna | Pembelian | 2016 | 3 | 9.750.000 |
| 113 | Switcher/menara antenna | Pembelian | 2016 | 15 | 48.750.000 |
| 114 | Audio Processor | Hibah | 2018 | 1 | 7.700.000 |
| 115 | Bangunan Menara Telekomunikasi | Pembelian | 2017 | 1 | 177.440.000 |
| 116 | Bangunan Menara Telekomunikasi | Pembelian | 2017 | 1 | 208.030.000 |
| 117 | Jaringan Distribusi | Pembelian | 2017 | 1 | 90.750.000 |
| 118 | Jaringan Distribusi | Pembelian | 2017 | 1 | 183.250.000 |
| 119 | Jaringan Distribusi | Pembelian | 2017 | 1 | 138.400.000 |
| 120 | Jaringan Telepon di Atas Tanah | Pembelian | 2010 | 1 | 5.000.000 |
|  | Total |  |  | 327 | 4.798.802.033 |

1. **Sumber Daya Aset**

Aset yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat yang tergambar dalam tabel berikut ini :

**Tabel 2.2.2 Aset Dinas Komunikasi dan Informatika KSB**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Spesifikasi Barang** | **Asal/Cara Perolehan Barang** | **Tahun Pemblian** | **Banyaknya** | **Keadaan Barang** |
| **Nama/ Jenis Barang** |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Portable Generating Set | Pembelian | 2017 | 1 | Baik |
| 2 | Portable Generating Set | Hibah | 2018 | 1 | Baik |
| 3 | Station Wagon/Toyota Avanza | Pembelian | 2010 | 1 | Baik |
| 4 | Station Wagon/ Isuzu | Pembelian | 2013 | 1 | Baik |
| 5 | Sepeda Motor/ Honda WIN | Pembelian | 2004 | 1 | Baik |
| 6 | Sepeda Motor Suzuki | Pembelian | 2006 | 1 | Baik |
| 7 | Sepeda Motor Suzuki Thunder | Pembelian | 2006 | 1 | Baik |
| 8 | Sepeda Motor Supra | Pembelian | 2008 | 1 | Baik |
| 9 | Sepeda Motor Vario | Pembelian | 2018 | 4 | Baik |
| 10 | Global Positioning System | Pembelian | 2014 | 1 | Baik |
| 11 | Mesin Ketik | Pembelian | 2018 | 1 | Baik |
| 12 | Rak Besi/Metal | Pembelian | 2016 | 1 | Baik |
| 13 | Filling Besi/Metal | Hibah | 2004 | 1 | Baik |
| 14 | Filling Besi/Metal | Pembelian | 2009 | 1 | Baik |
| 15 | Filling Kayu | Pembelian | 2011 | 1 | Baik |
| 16 | Lemari Kayu | Pembelian | 2018 | 5 | Baik |
| 17 | Papan Visuil | Pembelian | 2015 | 57 | Baik |
| 18 | Papan Visuil | Pembelian | 2017 | 1 | Baik |
| 19 | Papan Visuil | Pembelian | 2017 | 1 | Baik |
| 20 | Papan Nama Instansi | Pembelian | 2017 | 1 | Baik |
| 21 | Papan Pengumuman | Pembelian | 2017 | 1 | Baik |
| 22 | Papan Pengumuman | Pembelian | 2017 | 1 | Baik |
| 23 | Papan Pengumuman | Pembelian | 2018 | 1 | Baik |
| 24 | Mesin Absensi | Pembelian | 2017 | 1 | Baik |
| 25 | Overhead Projektor/Infocus | Pembelian | 2014 | 1 | Baik |
| 26 | Overhead Projektor/View Sonic | Pembelian | 2018 | 1 | Baik |
| 27 | Overhead Projektor/Microvosion | Hibah | 2018 | 1 | Baik |
| 28 | Overhead Projektor/Nec M403HG | Hibah | 2018 | 1 | Baik |
| 29 | Rak Kayu | Pembelian | 2008 | 1 | Baik |
| 30 | Meja Kayu/Rotan | Pembelian | 2017 | 2 | Baik |
| 31 | Meja Kayu/Rotan | Pembelian | 2017 | 7 | Baik |
| 32 | Meja Kayu Rotan | Pembelian | 2017 | 1 | Baik |
| 33 | Kursi Lipat/Chitose | Pembelian | 2009 | 6 | Baik |
| 34 | Kursi Lipat | Pembelian | 2013 | 5 | Baik |
| 35 | Kursi Lipat Chitose | Pembelian | 2018 | 50 | Baik |
| 36 | Meja Biro | Pembelian | 2009 | 3 | Baik |
| 37 | Sofa/Kayu local | Pembelian | 2009 | 1 | Baik |
| 38 | Sofa | Pembelian | 2018 | 2 | Baik |
| 39 | Meublair Lainnya | Pembelian | 2017 | 1 | Baik |
| 40 | Mesin Potong Rumput | Pembelian | 2018 | 1 | Baik |
| 41 | AC Unit/Sharp | Pembelian | 2017 | 1 | Baik |
| 42 | AC Unit/Sharp | Pembelian | 2017 | 1 | Baik |
| 43 | AC Unit | Pembelian | 2017 | 1 | Baik |
| 44 | AC Unit | Pembelian | 2017 | 1 | Baik |
| 45 | AC Split | Pembelian | 2009 | 1 | Baik |
| 46 | AC Split | Pembelian | 2016 | 2 | Baik |
| 47 | AC Split/Jetcool | Pembelian | 2017 | 1 | Baik |
| 48 | Loudspeaker/Toa | Pembelian | 2015 | 1 | Baik |
| 49 | Loud Speaker/Proel EX-15P | Hibah | 2018 | 4 | Baik |
| 50 | Loudspaeker/Proel Calbe Connector | Hibah | 2018 | 1 | Baik |
| 51 | Sound System/Home Use | Pembelian | 2018 | 1 | Baik |
| 52 | Microphone/Ashley SMR-6 | Hibah | 2018 | 1 | Baik |
| 53 | Microphone/Proel | Hibah | 2018 | 1 | Baik |
| 54 | Microphone Floor Stand | Hibah | 2018 | 4 | Baik |
| 55 | Tustel | Pembelian | 2011 | 1 | Baik |
| 56 | Tustel | Pembelian | 2013 | 1 | Baik |
| 57 | Alat Rumah Tangga Lain-lain | Pembelian | 2017 | 1 | Baik |
| 58 | Alat Rumah Tangga Lain-lain | Pembelian | 2018 | 1 | Baik |
| 59 | Internet | Pembelian | 2018 | 1 | Baik |
| 60 | P.C Unit/Acer | Pembelian | 2014 | 1 | Baik |
| 61 | P.C Unit/Asus | Pembelian | 2018 | 2 | Baik |
| 62 | P.C Unit/Lenovo | Pembelian | 2018 | 1 | Baik |
| 63 | Lap Top/Toshiba L40-AS101G Intel | Pembelian | 2015 | 1 | Baik |
| 64 | Laptop Toshiba | Pembelian | 2015 | 1 | Baik |
| 65 | Lap Top Asus | Pembelian | 2016 | 2 | Baik |
| 66 | Lap Top HP | Pembelian | 2016 | 1 | Baik |
| 67 | Lap Top HP | Pembelian | 2016 | 1 | Baik |
| 68 | Lap Top Asus | Pembelian | 2017 | 3 | Baik |
| 69 | Lap Top Asus | Pembelian | 2017 | 1 | Baik |
| 70 | Hard Disk | Pembelian | 2016 | 1 | Baik |
| 71 | Hard Disk | Pembelian | 2018 | 2 | Baik |
| 72 | Printer Canon | Pembelian | 2018 | 5 | Baik |
| 73 | Printer Epson | Pembelian | 2018 | 1 | Baik |
| 74 | Printer Epson LX 300 | Pembelian | 2018 | 1 | Baik |
| 75 | Printer HP | Pembelian | 2015 | 1 | Baik |
| 76 | Printer Canon Pixma MP 237 | Pembelian | 2015 | 1 | Baik |
| 77 | Printer Canon MP 237 | Pembelian | 2015 | 1 | Baik |
| 78 | Printer LX 310 | Pembelian | 2015 | 1 | Baik |
| 79 | Printer Canon Inkjet | Pembelian | 2016 | 1 | Baik |
| 80 | Printer Canon Pixma | Pembelian | 2017 | 3 | Baik |
| 81 | Peralatan Persomal Komputer | Pembelian | 2016 | 1 | Baik |
| 82 | Server HP | Pembelian | 2016 | 1 | Baik |
| 83 | Router | Pembelian | 2014 | 1 | Baik |
| 84 | Router | Pembelian | 2015 | 10 | Baik |
| 85 | Router | Pembelian | 2016 | 3 | Baik |
| 86 | Router | Pembelian | 2016 | 3 | Baik |
| 87 | Router | Pembelian | 2016 | 10 | Baik |
| 88 | Router | Pembelian | 2016 | 1 | Baik |
| 89 | Router | Pembelian | 2016 | 1 | Baik |
| 90 | Router | Pembelian | 2016 | 1 | Baik |
| 91 | Meja Kerja Pejabat Eselon III | Pembelian | 2012 | 2 | Baik |
| 92 | Meja Kerja Pejabat Lain-lain | Pembelian | 2010 | 1 | Baik |
| 93 | Meja Kerja Pejabat Lai-lain | Pembelian | 2010 | 1 | Baik |
| 94 | Meja Rapat Pejabat Lain-lain | Pembelian | 2007 | 6 | Baik |
| 95 | Meja Rapat Pejabat Lain-lain | Pembelian | 2009 | 6 | Baik |
| 96 | Kursi Kerja Pejabat Eselon II | Pembelian | 2013 | 1 | Baik |
| 97 | Kursi Kerja Pejabat Eselon II/frontline | Pembelian | 2017 | 1 | Baik |
| 98 | Kursi Kerja Pejabat Eselon III/olympic | Pembelian | 2006 | 1 | Baik |
| 99 | Kursi Kerja Pejabat Eselon III | Pembelian | 2017 | 2 | Baik |
| 100 | Kursi Kerja Pejabat Eselon IV/Olympic | Pembelian | 2006 | 3 | Baik |
| 101 | Kursi Kerja Pejabat Eselon IV | Pembelian | 2015 | 1 | Baik |
| 102 | Kursi Kerja Pejabat Eselon IV | Pembelian | 2017 | 7 | Baik |
| 103 | Lemari Arsip untuk arsip | Pembelian | 2015 | 1 | Baik |
| 104 | Camera + Attachment | Pembelian | 2018 | 1 | Baik |
| 105 | Camera + Attachment | Pembelian | 2018 | 1 | Baik |
| 106 | Audio Amplifier | Hibah | 2018 | 1 | Baik |
| 107 | Compact Disk Player | Hibah | 2018 | 1 | Baik |
| 108 | Unintemuptible Power Supply | Pembelian | 2018 | 1 | Baik |
| 109 | Lensa Kamera | Pembelian | 2013 | 1 | Baik |
| 110 | Amplifier | Pembelian | 2015 | 1 | Baik |
| 111 | Microphone | Pembelian | 2015 | 1 | Baik |
| 112 | Switcher/menara antenna | Pembelian | 2016 | 3 | Baik |
| 113 | Switcher/menara antenna | Pembelian | 2016 | 15 | Baik |
| 114 | Audio Processor | Hibah | 2018 | 1 | Baik |
| 115 | Bangunan Menara Telekomunikasi | Pembelian | 2017 | 1 | Baik |
| 116 | Bangunan Menara Telekomunikasi | Pembelian | 2017 | 1 | Baik |
| 117 | Jaringan Distribusi | Pembelian | 2017 | 1 | Baik |
| 118 | Jaringan Distribusi | Pembelian | 2017 | 1 | Baik |
| 119 | Jaringan Distribusi | Pembelian | 2017 | 1 | Baik |
| 120 | Jaringan Telepon di Atas Tanah | Pembelian | 2010 | 1 | Baik |
|  | Total |  |  | 327 | 4.798.802.033 |

*Sumber : Umum dan Perlengkapan Dinas Komunikasi dan Informatika KSB*

1. **Kinerja Pelayanan SKPD**

Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 22/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika, ada 2 (dua) jenis pelayanan dasar yang harus dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi masalah komunikasi dan informatika. Adapun jenis pelayanan dasar tersebut adalah sebagai berikut :

**Tabel II.4 Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator | Nilai |
| 1 | Pelaksanaan Diseminasi Informasi  Nasional | Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi |  |
| 2 |  | 1. Media massa seperti majalah, radio dan televise | 12 kali / tahun  = 100 % |
| 1. Media baru seperti website (media online) | Setiap hari |
| 1. Media Tradisional seperti pertunjukkan rakyat | 12 kali / tahun  = 100 % |
| 1. Media interpersonal seperti sarasehan, ceramah / diskusi dan lokakarya | 12 kali / tahun setiap  kecamatan |
| 1. Media luar ruang seperti media bulletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk dan baliho | 12 kali / tahun |
| 3 | Pengembangan  Dan Pemberdayaan  Kelompok Informasi Masyarakat | Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi  Masyarakat di tingkat Kecamatan | 50 % |

Selain dari pelaksanaan standar pelayanan minimal sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 22/PER/M.KOMINFO/12/2010 di atas, Bidang

Komunikasi dan Informatika telah melaksanakan Kegiatan terkait Pendataan menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat. Berikut adalah data tentang menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat :

**Tabel 2.5 Data Menara Telekomunikasi di Kabupaten Sumbawa Barat**

|  |  |
| --- | --- |
| Kecamatan | Jumlah |
| (1) | (2) |
| Sekongkang | 21 |
| Jereweh | 6 |
| Maluk | 13 |
| Taliwang | 32 |
| Brang Ene | 4 |
| Brang Rea | 10 |
| Seteluk | 9 |
| Poto Tano | 12 |
| TOTAL | 107 |

**Tabel 2.6 Banyaknya Izin Usaha Komunikasi dan Informatika**

**Menurut Jenisnya Tahun 2015**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kecamatan | Counter | Tv Kabel | Warnet | Radio Siaran |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Sekongkang | 10 | 1 | 1 | 0 |
| Jereweh | 20 | 1 | 3 | 0 |
| Maluk | 27 | 5 | 6 | 0 |
| Taliwang | 95 | 6 | 23 | 2 |
| Brang Ene | 10 | 4 | 0 | 0 |
| Brang Rea | 27 | 8 | 1 | 0 |
| Seteluk | 22 | 6 | 3 | 0 |
| Poto Tano | 8 | 2 | 0 | 0 |

Sumber : Seksi Komunikasi Diskominfo KSB

1. **Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD**

Dari hasil analisis terhadap Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Renstra SKPD Dinas PerhKomunikasi dan Informatika kabupaten/kota se Nusa Tenggara Barat dan hasil telaahan terhadap RTRW, terdapat sinkronisasi antar dokumen perencanaan dari pusat hingga kabupaten / kota yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat pada lima tahun mendatang.

Adapun tantangan dan peluang pengembangan pelayananan Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat untuk lima tahun mendatang adalah sebagai berikut :

1. Tofografi wilayah Kabupaten Sumbawa Barat yang cenderung berbukit sehingga berpengaruh kepada cakupan wilayah akses komunikasi khususnya bagi masyarakat perdesaaan.
2. Banyaknya wilayah administrasi pemerintahan yang mempengaruhi cakupan areah penyebaran informasi nasional.
3. Pengembangan potensi Sumber daya manusia aparat khususnya dalam bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
4. Pemanfaaatan kelompok informasi masyarakat sebagai sarana untuk menyebarkan informasi nasional.
5. Sarana dan prasarana yang masih belum memadai.
6. Belum adanya regulasi terkait pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, statistik dan persandian.
7. Belum adanya pengelolaan data untuk informasi dan informasi khusus daerah.

**BAB III**

**ISU – ISU STRATEGIS**

**BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

1. **Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD**

Tugas pokok dan fungsi sesuai dengan peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 49 Tahun 2016 Tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa Barat adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat adalah sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang statistik dan persandian;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang komunikasi dan informatika;
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup dan tugasnya;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Dalam pelaksanaan pokok dan fungsi di atas, Dinas KomunikASI dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat masih mempunyai permaslahan antara lain :

1. Internal
2. Masih kurang tersedianya Sumber Daya Manusisa ( SDM ) Aparat yang berkualitas. Hal ini dipengaruhi oleh formasi yang disediakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tiadak berbanding lurus dengan kebutuhan dinas.
3. Belum tersedianya data dan informasi yang valid. Hal ini dipengaruhi oleh belum adanya data dari SKPD yang ada dilingkup Daerah Kabupaten Sumbawa Barat yang kemudian dapat diolah menjadi informasi daerah.
4. Kurang sarana dan perasarana dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan. Hal ini karena disebabkan Diskominfo KSB adalah SKPD baru, sehingga saran dan perasaran yang dipunyai belum memadai.
5. Eksternal
6. Belum optimalnya koordinasi dengan kementerian ataumlembaga yang terkait dalam hal tata laksana program dan kegiatan yang pada Diskominfo KSB. Hal tersebut dikarenakan selaian urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika, Diskominfo KSB juga harus menjalankan urusan pemerintahan dibidang statistik dan persandian.
7. Masih belum optimalnya pelaksanan standar pelayanan minimal kepada masyarakat .

1. **Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Visi daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021 adalah ***“terwujudnya pemenuhan hak – hak dasar masyarakat yang berkeadilan menuju Kabupaten Sumbawa Barat sejahtera berlandaskan gotong royong”***

Makna yang terkandung dalam dalam visi tersebut adalah dijabarkan sebagai berikut:

1. **Gotong Royong** . Gotong Royong adalah modal sosial yang senantiasa tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat Sumbawa Barat. Gotong Royong dalam bekerja adalah kultur dan budaya yang mengakar dalam kehidupan masyarakat untuk menghadapi tantangan zaman dan menyelesaikan permasalahan. Musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan, dan gotong royong dalam bekerja adalah instrument yang sangat kuat untuk memobilisasi seluruh sumber daya yang dimiliki Kabupaten Sumbawa Barat . Semangat Kolektifitas menggerakkan partisipasi untuk mewujudkan cita-cita Ber-Sumbawa Barat. Tanpa semangat Musyawarah mufakat dan Gotong-royong, maka segala ide, nilai dan pelaksanaan pembangunan tidaklah sukses.
2. **Pemenuhan Hak** - **Hak dasar.** Pemenuhan hak-hak dasar adalah instrument utama untuk mewujudkan masyarakat Sumbawa Barat yang sejahtera dengan di landasi gotong royong. Pemenuhan hak-hak dasar rakyat adalah urusan pemerintahan yang di atur oleh perangkat Undang-Undang. **Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar** meliputi : perencanaan pembangunan, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi da usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, pemberdayaan masyarakat dan desa, statistik, kearsipan, komunikasi dan informatika, perpustakaan. Sementara itu, Urusan Pemerintahan pilihan sebagai berikut : pertanian (meliputi : tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan); kehutanan; energi dan sumber daya mineral; pariwisata; kelautan dan perikanan; perdagangan; industri; ketransmigrasian.
3. **Berkeadilan**. Berkeadilan adalah terdistribusinya hak-hak dasar yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat luas dengan kualitas yang sesuai dengan indikator-indikator kemanusiaan yang adil dan beradab. Berkeadilan juga mengandung makna keberpihakan untuk melindungi dan membina masyarakat yang secara ekonomi dan social masuk dalam kategori masyarakat rentan dan masyarakat miskin. Pemerintah Daerah akan memenuhi hak-hak dasar masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, nilai demokrasi serta berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku. Pemerintah Daerah akan menghadirkan pemerintahan yang benar-benar bekerja untuk masyarakat sebagai bentuk perhatian dan upaya yang luar biasa terhadap kelompok masyarakat rentan dan miskin yang membutuhkan perlindungan dan pemberdayaan.
4. **Masyarakat Sejahtera**. Masyarakat Sejahterah adalah cita-cita dilaksanakannya pembangunan dan pemerintahan. Kesejahteraan *(welfare)* pada umumnya di definisikan sebagai kesejahteraan ekonomi yang memiliki indicator pada : (i) Peningkatan pertumbuhan ekonomi, (ii) Pengendalian inflasi, dan (iii) penciptaan lapangan kerja. Namun, kesejahteraan ekonomi tidak dapat berdiri sendiri. Terdapat aspek social dan lingkungan yang juga saling mempengaruhi. Aspek ekonomi, social, dan lingkungan yang berinteraksi berpusat pada usaha meningkatkan kualitas hidup *(quality of life)*. Oleh karena itu, dalam lima tahun ke depan, pemenuhan hak-hak dasar yang berkeadilan di landasi semangat gotong royong, harus di ikuti dengan upaya-upaya yang luar biasa untuk mewujudkan kesejahteraan *(welfare)* dan meningkatkan kualitas hidup *(quality of life)* agar masyarakat kabupaten Sumbawa Barat benar-benar merasakan dan meraih manfaat dan dampak pembangunan.

Misi pembangunan daerah Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2016 – 2021. Dalam misi ketiga pembangunan daerah tersebut adalah mewujudkan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pelayanan public yang berkualitas dan bermanfaat. Misi tersebut merupakan prasyarat utama untuk mendorong proses pembangunan daerah secara cepat dan merata sesuai dengan harapan seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian diharapkan akan dapat mewujudkan pemerintahan daerah yang berorientasi kepada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pelayanan public prima.

Memperhatikan visi dan misi pembangunan daerah sebagaimana yang telah disebutkan di atas, maka tujuan yang sesuai dengan misi tersebut adalah :

1. Meningkatnya aksesbilitas teknologi komunikasi dan informasi
2. Meningkatnya kualitas data dan informasi

Sasaran daripada tujuan meningkatnya aksesbilitas teknologi dan informasi adalah :

1. Tersedianya sarana dan prasarana teknologi komunikasi dan informasi secara merata,
2. Tersedianya sumberdaya manusia aparat yang berkualitas,
3. Tersedianya lembaga penyedia layanan yang profesional, dan
4. Tersuluhnya masyarakat secara menyeluruh

Sasaran daripada tujuan meningkatnya kualitas data dan informasi adalah :

1. Tersedianya data statistik yang berkualitas
2. Terwujudnya efektivitas pengolahan data
3. Terwujudnya penyebaran dan kemudahan akses terhadap informasi data
4. Meningkatnya kemampuan aparatur dalam mengolah data
5. Tersedianya informasi atas pelaksanaan kegiatan

**Table 3.1**

**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika KSB Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Terpilih**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Misi | Permasalahan | Faktor Penghambat | Faktor Pendorong |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Misi 3 Bupati/Wabub : Mewujudkan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pelayanan publik yang berkualitas dan bermanfaat | Kurang tersedianya sarana dan prasarana teknologi komunikasi dan informasi secara merata | Kantor wilayah Kabupaten Sumbawa Barat yang Berbukit dan prosentase luas lahan yang sangat curam diatas 50% | Banyaknya wilayah administrasi pemerintahan tingkat desa adalah sebesar 57 desa |
|  |  | Kurang tersedianya SDM aparat yang berkualitas | Formasi pegawai oleh BKD | Ketersediaan anggaran khususnya dalam kegiatan diklat dan bimbingan teknis |
|  |  |  | Minimnya jumlah lembaga layanan penyedia layanan yang professional | Ketersediaan anggaran khususnya dalam kegiatan sosialisasi dan fasilitas |
|  |  |  | Banyaknya jumlah masyarakat dan tersebar hingga pelosok-pelosok desa untuk masyarakat secara menyeluru | Kegiatan diseminasi merupakan standar pelayanan yang minimal harus dilaksanakan |
|  |  |  | Masih minimnya Jumlah dokumen data dan informasi daerah di antaranya data dan informasi yang masih kurang valid |  |

1. **Telaahan Renstra Kementrerian / Lembaga dan Renstra SKPD Provinsi**

Visi kementerian Komunikasi dan Informatika untuk tahun 2015 – 2019, mengacu kepada visi pembangunan nasional yaitu *“Terwujudnya Indonesia yang berdaulat Mandiri, dan berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”* . Upaya untuk mewujudkan visi tersebut melalui 7 misi pembangunan nasional yaitu :

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritime dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai Negara Kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju berkesinambungan dan demokrasi berlandaskan Negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai Negara maritime.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing, dan
6. Mewujudkan Indonesia menjadi Negara maritime yang manadiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional serta,
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribdian dalam kebudayaan.

Tujuan kementerian Komunikasi dan Informatika meliputi focus pembangunan bidang Komunikasi dan Informatika sebagai pendukung program unggulan pemerintah Indonesia yaitu kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kemitraan, pariwisata, dan industry, infrastruktur, pengembangan SDM, dan Perbatasan dan kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai leading sektor. Tujuan kementerian Komunikasi dan Informatika antara lain :

1. Mengelolah Sumber daya spectrum frekuensi radio secara optimal.
2. Mewujudkan tata kelolah komunikasi dan informatika yang segat, efisien dan aman.
3. Meningkatkan efisiensi industri komunikasi dan informatika
4. Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi
5. Menciptakan sumber daya TIK yang unggul, produktif dan berdaya saing
6. Meningkatkan partisipasi public terhadap pengambilan kebijakan publik, dan
7. Menyediakan dukungan TIK dalam rangka pencapaian focus pembangunan pemerintah Indonesia.

Sasaran strategis pembangunan Komunikasi dan Informatika berdasarkan rencana strategis kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2015 – 2019 disusun dengan 4 fokus utama yaitu :

1. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai pendukung dari fokus pembangunan pemerintah di bidang pangan, maritime, energy, pariwisata, industry, infrsastruktur, sumber daya manusia dan wilayah perbatasan.
2. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai leading sektor di bidang Telekomunikasi, Internet dan Penyiaran.
3. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai regular yang mengatur kebijakan di bidang Telekomunikasi, Internet dan Penyiaran.
4. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai bagian dari sistem birokrasi pemerintah yang harus dibenahi dalam rangka memberikan pelayanan publik yang prima.

Berdasarkan 4 fokus diatas, sasaran strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2015 – 2019 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran Negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan.
2. Tersedianya akses pitalebar nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, pertanahan, dan keamanan.
3. Terselenggaranya tata kelolah Komunikasi dan Informatika yang efisien, berdaya saing, dan aman.
4. Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelolah kementerian Komunikasi dan informatika yang berintegritas, bersih, efektif, dan efisien.

Selain bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang urusan pemerintahan yang menjadi tugas pokok dari Dinas komunikasi dan dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat adalah “ Pelopor Data Statistik Terpercaya untuk semua” Untuk bisa mewujudkan visi tersebut BPS Provinsi NTB, sesuia dengan Renstra BPS Tahun 2015 -2019, Mempunyai misi sebagai berikut:

1. Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional.
2. Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi d bidang statistik; dan
3. Membangun insan statistik yang professional, berintegrasi dan amanah untuk kemajuan persatuan.

Selain itu menurut Peraturan Kepala Lembaga Shandi Negara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Lembaga Sandi Negara Tahun 2015 – 2019 di arahkan pada sasara *“terjaminnya layanan system keamanan informasi berklarifikasi milik pemerintah atau Negara (informasi assurance)”.*

Dalam rangka perumusan kegiatan dalam penyusunan RKPD, maka harus diperhatiakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan tata kelolah penjamin keamanan informasi berklarifikasi milik pemerintah atau Negara sesuai peraturan yang berlaku melalui kegiatan sebagai berikut :
2. Pengelolaan dan perlindungan informasi berklarifikasi dengan pedoman pada peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2012 tentang pedoman Pengelolahan dan perlingan informasi Berklarifikasi Milik Pemerintah.
3. Penyusunan perencanaan, anggaran dan target capaian penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi di tingkat pimpinan daerah meliputi kepala daerah, pimpinan dewan dan pimpinan perangkat daerah dan di tingkat pengelolah informasi di setiap perangkat daerah.
4. Menyusun kebijakan teknis persandian untuk pengamanan informasi dengan berpedoman pada NSPK yang telah disusun oleh Lembaga Sandi Negara.
5. Penetapan pola hubungan komunikasi sandi sesuai dengan besaran dan jumlah perangkat daerahnya dengan berpedoman pada peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 14 Tahun 2010 tentang pedoman Penyelenggaraan Jaringan Komunikasi Sandi.
6. Pengelolaan sumber daya persandian melalui kegiatan antara lain sebagai berikut :
7. Penyiapan, pemanfaatan dan pengembangan SDM sandi, Materil Sandi dan Jaring Komunikasi Sandi.
8. Pemenuhan kompetensi SDM Sandi melalui penyiapan dan pengiriman personil untuk mengikuti diklat-diklat sandi yang diselenggarakan oleh Lembaga Sandi Negara sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pendidikan dan Pelatihan Sandi.
9. Pelaksanaan jabatan fungsional di bidang persandian dengan berpedoman pada peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 76 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Sandiman dan Angka Kreditnya keputusan Menteri pemberdayagunaan Aparatur Negara Nomor 133/KEP/11/2003 tentang Jabatan Fungsional Operator Transmisi Sandi dan Angka Kreditnya.
10. Pemenuhan kesejahteraan bagi SDM Sandi sebagai Pengelolah pengamanan persandian melalui pemberian tunjangan pengamanan persandian (TPP) dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2008.
11. Pemenuhan kesejahteraan bagi SDM Sandi yang telah diangkat dalam jabatan fungsional Sandiman dan Operator Transmisi Sandi melalui pemberian tujangan jabatan fungsionaril Sandiman dan Operator Transmisi dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan.
12. Peningkatan kompetensi SDM Sandi melalui partisipasi pada kegiatan pembinaan persandian yang diselengarakan oleh Lembaga Sandi Negara baik melalui asistensi, workshop, pelatihan, seminar dan/atau bimbingan teknis persandian.
13. Peningkatan kesadaran keamanan informasi (security awareness) dengan menyelenggarakan sosialisi atau seminar pentingnya kesadaran keamanan informasi di tingkat pimpinan daerah meliputi kepala daerah, pimpinan dewan dan pimpinan perangkat daerah dan tingkat pengelolah informasi di setiap perangkat daerah.
14. Peningkatan kesadaran keamanan informasi (security awareness) dengan berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi atau seminar pentingnya kesadaran keamanan informasi yang diselenggarakan oleh Lembaga Sandi Negara.
15. Pengelolaan pusat data persandian.
16. Dukungan layanan operasional persandian untuk pengamanan informasi berklarifikasi milik pemerintah atau Negara dalam penyelenggaraan keperintahan melalui kegiatan sebagai berikut :
17. Pengelolahan dan pemeliharaan materil, sarana dan prasarana persandian untuk pengamanan informasi dengan berpedoman pada Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembinaan Materil Sandi di Instansi Pemerintah dan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pedoman Gelar Jaring Komunikasi Sandi serta sesuai dengan pola hubungan komunikasi yang telah di tetapkan sebelumnya.
18. Pengamanan fisik dan control terhadap akses informasi atau fasilitas pemroses informasi terutama yang berkaitan langsung dengan pimpinan daerah, pimpinan dewan pengelolah informasi yang antara lain dengan kegiatan kontra pengindraan.
19. Pemulihan data dari gangguan jaringan system informasi dengan tetap menjaga integritas dan ketersediaan data.
20. Pelaksanaan kebijakan manajemen resiko asset informasi organisasi.
21. Pengawasan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi secara internal melalui kegiatan sebagai berikut :
22. Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian secara internal pada masing – masing perangkat daerah.
23. Pengawasan dan evaluasi tingkat keamanan informasi secara internal pada masing – masing perangkat daerah.
24. **Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2 Tahun 2012 Tentang rencanan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Barat,bahwa salah satu kebijakan penataan runag adalah pengembangan system prasarana wilayah yang mendukung pemasaran hasil pertanian, perikanan dan pariwisata. Salah satu strategi Pengembangan Sistem prasarana wilayah yang mendukung pemasaran hasil pertanian, perikanan dan pariwisata adalah mendorong pengembangan infrastruktur telekomunikasi dan informasi terutama di kawasan terisolir.

Rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi menurut rencana tata ruang wilayah Kabupaten Sumbawa Barat, terdiri atas :

1. Pengembangan jaringan mikro digital perkotaan di Sekongkang ke masing-masing :Ai kangkung (13 km) dan Tatar (11 km), Seteluk-UPT tambak Sari sepanjang 7,5 km, Taliwang – Sampir sepanjang 4 km.
2. Penerapan teknologi telematika berbasis teknologi modern;
3. Pembangunan teknologi telematika pada wilayah-wilayah pusat pertumbuhan;
4. Pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi yang menghubungkan setiap wilayah pertumbuhan dengan ibukota kabupaten;
5. Pemanfaatan secara bersama pada suatu tower BTS untuk beberapa operator telepon selular dengan pengelolaan secara bersama; dan
6. Pengembangan jaringan televise dan radio ke seluruh pelosok pedesaan wilayah Kabupaten Sumbawa Barat.

Tabel 3.6 Indikasi Program Perwujudan Rencana Struktur Wilayah

Pengembangan Sistem Jaringan Telekomunikasi

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Usulan Program Utama** | **Lokasi** | **Sumber Pendanaan** | **Instansi Pelaksana** | **Tahun Pelaksanaan** | | | | | | | |
| **I** | | | | | **II** | **III** | **IV** |
| **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016**  **-**  **2020** | **2021**  **-**  **2025** | **2026**  **-**  **2030** |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | **(6)** | **(7)** | **(8)** | **(9)** | **(10)** | **(11)** | **(12)** | **(13)** |
| 1 | **Pembuatan Peraturan Tata Kelola SPBE** | KSB | APBN &/ APBDP &/ APBDK | Kem. Kominfo Dishubkominfo, Telkom |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **Optimalisasi Penggunaan Jaringan Pita Lebar** | KSB | APBN &/ APBDP &/ APBDK | Kem. Kominfo Dishubkominfo, Telkom |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | **Pengembangan Aplikasi Informatika terintegrasi** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | **Optimalisasi Pemakaian Sarana Teknologi dan Informatika** | KSB | APBN &/ APBDP &/ APBDK | Kem. Kominfo Dishubkominfo, Telkom |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | **Pengadaan Taman Pintar Digital** | KSB | APBN &/ APBDP &/ APBDK | Kem. Kominfo Dishubkominfo, Telkom |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | **Pengembangan KomunikasiPublik** | KSB | APBN &/ APBDP &/ APBDK | Kem. Kominfo Dishubkominfo, Telkom |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | **Pengembangan Data dan Informasi Statistik Sektoral** | KSB | APBN &/ APBDP &/ APBDK | Kem. Kominfo Dishubkominfo, Telkom |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | **Pengembangan Sistem Persandian Daerah** | KSB | APBN &/ APBDP &/ APBDK | Kem. Kominfo Dishubkominfo, Telkom |  |  |  |  |  |  |  |  |

Sumber : Lampiran Perda KSB Nomor 2 Tahun 2012 Tentang RTRW KSB Tahun 2011 -2031

1. **Penentuan Isu – Isu Strategis**

Kabupaten Sumbawa Barat merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki potensi sangat besar, baik pada sektor wisata, peternakan, pertanian maupun hasil laut. Namun seluruh potensi tersebut belum dikelola dan dimanfaatkan secara maksimal, hal ini terjadi karena belum memadainya infrastruktur pendukung dan masih rendahnya kualitas sebagian sumber daya manusia yang dimiliki sehingga menjadi hambatan dan ancaman bagi kelangsungan pembangunan daerah. Sumber daya alam yang tersedia sudah seharusnya dikelola secara lebih professional sehingga mampu meningkatkan perekonomian daerah.

Beberapa isu-isu strategis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat tergambar dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.5

Isu –isu Strategis Dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Bidang** | **Masalah** | **Issue** |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** |
| 1 | Komunikasi dan Informatika | Belum meratanya sarana prasarana komunikasi di Kabupaten Sumbawa Barat | Penyebaran informasi masih belum merata |
| Belum optimalnya kegiatan penyebarluasan informasi nasional |
| 2 | Statistik dan Persandian | Belum tersedianya data untuk informasi / khusus daerah | Ketersediaan data masih terbatas, pengamanan data masih belum maksimal |
| Belum maksimalnya pengamanan data |
| 3 | Sekretariat | Pelayanan internet dinas belum tertib dan lancar | Pelayanan administrasi perkantoran masih belum tertib dan lancar |

**BAB IV**

**VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**

**STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

**4.1 Visi dan Misi**

Visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat ditetapkan dalam rangka untuk mendukung terwujudnya visi Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.

Adapun Visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat adalah sebagai berikut :

**” TERWUJUDNYA** **PELAYANAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI YANG OPTIMAL DIDUKUNG OLEH KETERSEDIAAN DATA DAN PERSANDIAN YANG ANDAL”**

Penjelasan Visi :

Kalimat “Pelayanan Komunikasi dan Informasi Yang Optimal” : mengandung pengertian bahwa pelayanan komunikasi dan informasi mampu menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Sumbawa Barat dengan mudah dan cepat serta berkualitas.

Kalimat “Ketersediaan Data Dan Persandian Yang Andal” : mengandung pengertian bahwa ketersediaan data dengan persandian merupakan salah satu komponen dalam penyusunan informasi. Oleh karena itu dibutuhkan keandalan atau dapat dipercaya atas keduanya.

Dalam rangka mewujudkan visi yang dicanangkan di atas, maka disusunlah Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2017 - 2021, yaitu sebagai berikut :

1. Mendorong kelancaran dan ketertiban pelayanan administrasi perkantoran
2. Meningkatkan kemudahan akses informasi secara merata
3. Meningkatkan ketersediaan data yang valid
4. Meningkatkan keamanan data dan informasi yang andal

**4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah**

Mengacu pada pernyataan Misi tersebut diatas, maka Tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2017 - 2021 adalah :

1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas laporan keuangan dan program SKPD
2. Meningkatnya efektifitas pelayanan perkantoran
3. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan komunikasi
4. Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyebaran informasi
5. Meningkatnya kualitas data dan informasi
6. Meningkatnya kualitas keamanan data dan informasi

Sedangkan Sasaran yang ingin dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2017 - 2021 adalah sebagai berikut :

1. Tujuan : Meningkatnya kualitas dan kuantitas laporan keuangan dan program SKPD, sasaran - sasarannya adalah :
2. Tersedianya laporan keuangan yang tepat waktu
3. Tersusunnya program kegiatan yang terpadu
4. Tujuan : Meningkatnya efektifitas pelayanan perkantoran, sasarannya adalah :
5. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai
6. Tersedianya data dan informasi yang valid
7. Tersedianya laporan kepegawaian tepat sasaran
8. Tujuan : Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan komunikasi, sasaran - sasarannya adalah :
9. Tersedianya tenaga pranata komputer yang terampil
10. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai
11. Tersedianya peraturan pengelolaan TIK yang jelas
12. Tersedianya data informasi pelayanan komunikasi yang valid
13. Tujuan : Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyebaran informasi, sasaran - sasarannya adalah :
14. Terbentuk dan terbinanya kelompok informasi masyarakat
15. Tersedianya sarana dan prasarana penyebaran informasi yang memadai
16. Tujuan : Meningkatnya kualitas data dan informasi, sasaran - sasarannya adalah :
17. Tersedianya data statistik yang berkualitas
18. Terwujudnya efektivitas pengolahan data
19. Terwujudnya penyebaran dan kemudahan akses terhadap informasi data
20. Meningkatnya kemampuan aparatur dalam mengolah data
21. Tersedianya informasi atas pelaksanaan kegiatan
22. Tujuan : Meningkatnya kualitas keamanan data dan informasi, sasaran - sasarannya adalah :
23. Terselenggaranya keamanan data dan informasi
24. Tersedianya aparat persandian yang professional

**4.3. Strategi dan Kebijakan**

Strategi dan kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam rangka untuk mendukung tercapainya misi dan visi dari pemerintah Kabupaten Sumbawa barat dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan komunikasi dan Tersedianya data informasi yang valid, untuk laporan kepegawaian tepat sasaran, yang bersifat kebijakan, program, atau manajerial yang memungkinkan penilaian atas pencapaian dari sasaran.

Strategi adalah Pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktifitas dalam turun waktu tertentu. Tujuan dari strategi memungkinkan penilaian atas pencapaian sasaran di masa depan sedangkan Kebijakan merupakan rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Tujuan kebijakan merupakan pola atau model tindakan pejabat pemerintah mengenai keputusan – keputusan diskresinya secara terpisah. Kebijakan harus mencakup apa yang nyata pemerintah perbuat yang akan dikerjakan, bentuk kebijakan bisa berupa hal yang positf atau hal yang negatif, kebijakan yang bentuknya positif di dasarkan pada ketentuan hukum dan kewenangan sesuai dengan peraturan pemerintah.

Tabel 4.1 Strategi dan Arah Kebijakan

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kode | Strategi | Kode | Arah Kebijakan |
| 1.1 | Konsultasi, Evaluasi, Reportasi | 1.1 | Laporan bulanan dan tahunan tepat waktu |
| 1.2 | Konsultasi, Evaluasi, Reportasi | 1.2 | Program kegiatan terpadu |
| 2.1 | Transaksi, Konstruksi dan Rehabilitasi | 2.1 | Sarana perkantoran yang memadai |
| 2.2 | Inventarisasi, Identifikasi, Evaluasi | 2.2 | Database Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Sumbawa Barat |
| 2.3 | Konsultasi, Evaluasi, Reportasi | 2.3 | Laporan disiplin kerja pegawai |
| 3.1 | Koordinasi, Edukasi | 3.1 | Tenaga jabatan fungsional dan pelatihan |
| 3.2 | Transaksi, Kerjasama | 3.2 | Sarana telekomunikasi |
| 3.3 | Regulasi, Visitasi, Sosialisasi | 3.3 | Masterplan dan Peraturan Pengelolaan TIK |
| 3.4 | Koordinasi, Visitasi | 3.4 | Data menara telekomunikasi dan jenis usaha komunikasi dan informatika |
| 4.1 | Koordinasi, Visitasi, Sosialisasi, Fasilitasi | 4.1 | Kelompok Informasi Masyarakat |
| 4.2 | Transaksi, Evaluasi | 4.2 | Sarana dan Prasarana Penyebaran Informasi |

**Tabel 4.1**

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Sumbawa Barat**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran/TUJUAN | Target Kinerja Sasaran Tahun | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | Indeks SPBE | persentase SKPD yang sudah memanfaatkan IT dalam pengelolaan pemerintah | jumlah skpd yang memanfaatkan it | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
|  |  | Membentuk dan meningkatkan kapasitas kelembagaan produsen informasi public | Tersedianya lembaga-lembaga Pengelola Web, Lembaga Monitoring Media, Dewan Redaksi Konten Pemda dan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan PPID serta Komisi Informasi daearah | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
|  |  | Mendorong OPD untuk melakukan pengumpulan Data Sektoral | Meningkatnya Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi yang valid | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
|  |  |  | Persentase pengamanan sistem informasi Daerah | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
|  |  |  | **Nilai SAKIP Perangkat Daerah** | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |

**4.2 Strategi dan Kebijakan**

Tabel 4.2

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : TERWUJUDNYA PELAYANAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI YANG OPTIMAL DIDUKUNG OLEH KETERSEDIAAN DATA DAN PERSANDIAN YANG ANDAL

Misi I : Mendorong kelancaran dan ketertiban pelayanan administrasi perkantoran

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Tujuan | Sasaran | | Strategi | | Arah Kebijakan | | Kebijakan Umum | |
| (1) | (2) | (3) | | (4) | | (5) | | (6) | |
| 1 | Meningkatnya kualitas dan terwujudnya kuantitas laporan keuangan dan program SKPD yang selaras | 1.1 | Tersedianya laporan keuangan yang tepat waktu | 1.1 | Konsultasi, Evaluasi, Reportasi | 1.1 | Laporan bulanan dan tahunan tepat waktu | 1.1 | Penerapan anggaran berbasis kinerja |
|  |  | 1.2 | Tersusunnya program kegiatan yang terpadu | 1.2 | Konsultasi, Evaluasi, Reportasi | 1.2 | Program kegiatan terpadu | 1.2 | Kerjasama dengan pemerintah propinsi dan pusat |
| 2 | Meningkatnya efektifitas pelayanan perkantoran | 2.1 | Tersedianya perlengkapan dan fasilitas perkantoran yang memadai | 2.1 | Transaksi, Konstruksi dan Rehabilitasi | 2.1 | Sarana perkantoran yang memadai | 2.1 | Kerjasama dengan pihak swasta |
|  |  | 2.2 | Tersedianya data dan informasi yang valid | 2.2 | Inventarisasi, Identifikasi, Evaluasi | 2.2 | Database Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Sumbawa Barat | 2.2 | Kerjasama dengan instansi terkait |
|  |  | 2.3 | Tersedianya laporan kepegawaian tepat sasaran | 2.3 | Konsultasi, Evaluasi, Reportasi | 2.3 | Laporan disiplin kerja pegawai | 2.3 | Penerapan penghargaan dan sanksi |

Misi II : Meningkatkan kemudahan akses informasi secara merata

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Tujuan | Sasaran | | Strategi | | Arah Kebijakan | | Kebijakan Umum | |
| (1) | (2) | (3) | | (4) | | (5) | | (6) | |
| 3 | Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan komunikasi | 3.1 | Tersedianya tenaga pranata komputer yang terampil | 3.1 | Koordinasi, Edukasi | 3.1 | Tenaga jabatan fungsional dan pelatihan | 3.1 | Koordinasi dengan instansi terkait dan lembaga pelatihan |
|  |  | 3.2 | Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai | 3.2 | Transaksi, Kerjasama | 3.2 | Sarana telekomunikasi | 3.2 | Kerjasama dengan BUMN, swasta |
|  |  | 3.3 | Tersedianya peraturan pengelolaan TIK yang jelas | 3.3 | Regulasi, Visitasi, Sosialisasi | 3.3 | Masterplan dan Peraturan Pengelolaan TIK | 3.3 | Kerjasama dengan akademisi, pemerintah pusat, provinsi, daerah dan pelaku usaha bidang komunikasi dan informatika |
|  |  | 3.4 | Tersedianya data informasi pelayanan komunikasi yang valid | 3.4 | Koordinasi, Visitasi | 3.4 | Data menara telekomunikasi dan jenis usaha komunikasi dan informatika | 3.4 | Koordinasi dengan pihak swasta dan pelaku usaha bidang komunikasi dan informatika |
| 4 | Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyebaran informasi | 4.1 | Terbentuk dan terbinanya kelompok informasi masyarakat | 4.1 | Koordinasi, Visitasi, Sosialisasi, Fasilitasi | 4.1 | Kelompok Informasi Masyarakat | 4.1 | Kerjasama dengan pihak kecamatan dan desa |
|  |  | 4.2 | Tersedianya sarana dan prasarana penyebaran informasi yang memadai | 4.2 | Transaksi, Evaluasi | 4.2 | Sarana dan Prasarana Penyebaran Informasi | 4.2 | Kerjasama dengan pihak swasta |

Misi III : Meningkatkan ketersediaan data yang valid

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Tujuan | Sasaran | | Strategi | | Arah Kebijakan | | Kebijakan Umum | |
| (1) | (2) | (3) | | (4) | | (5) | | (6) | |
| 5 | Meningkatnya kualitas data dan informasi | 5.1 | Tersedianya data statistik yang berkualitas | 5.1 | Koordinasi, Fasilitasi, Validasi, Regulasi | 5.1 | -Dokumen statistik sektoral dan dasar  -Verifikasi  -Peraturan Daerah/ Peraturan Bupati | 5.1 | Kerjasama dengan SKPD/ instansi/ lembaga terkait dan BPS |
| 5.2 | Terwujudnya efektivitas pengolahan data. | 5.2 | Koordinasi, Fasilitasi, Konstruksi | 5.2 | Aplikasi pengolahan data | 5.2 | Kerjasama dengan SKPD/ instansi/ lembaga terkait dan pihak ketiga |
| 5.3 | Terwujudnya penyebaran dan kemudahan akses terhadap informasi data | 5.3 | Publikasi | 5.3 | Penyebaran data melalui media cetak dan elektronik | 5.3 | Kerjasama dengan SKPD/ instansi/ lembaga terkait dan pihak ketiga |
| 5.4 | Meningkatnya kemampuan aparatur dalam mengolah data | 5.4 | Sosialisasi | 5.4 | Sumber daya pengelola data | 5.4 | Kerjasama dengan SKPD/ instansi/ lembaga terkait Tingkat Kab./ Prov/ Pusat |
| 5.5 | Tersedianya informasi atas pelaksanaan kegiatan | 5.5 | Identifikasi, Evaluasi | 5.5 | Pengendalian kegiatan | 5.5 | Kerjasama dengan SKPD/ instansi/ lembaga terkai |

Misi IV : Meningkatkan keamanan data dan informasi yang andal

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Tujuan | Sasaran | | Strategi | | Arah Kebijakan | | Kebijakan Umum | |
| (1) | (2) | (3) | | (4) | | (5) | | (6) | |
| 6 | Meningkatnya kualitas keamanan data dan informasi | 6.1 | Tersedianya sarana dan prasarana persandian yang memadai | 6.1 | Koordinasi, Edukasi | 6.1 | Sarana dan prasarana persandian | 6.1 | Kerjasama dengan SKPD terkait |
|  |  | 6.2 | Tersedianya aparat persandian yang professional | 6.2 | Koordinasi, Edukasi | 6.2 | Tenaga pengelolah persandian | 6.2 | Kerjasama dengan Lemsaneg dan pihak terkait |

**BAB V**

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

**5.1 Program dan Kegiatan Lokalitas SKPD**

Visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat ditetapkan dalam rangka untuk mendukung terwujudnya visi pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.

Adapun visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat adalah sebagai berikut :

**“ TERWUJUDNYA PELAYANAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI YANG OPTIMAL DIDUKUNG OLEH KETERSEDIAAN DATA DAN PERSANDIAN YANG ANDAL”**

Penjelasan Visi :

Kalimat “Pelayanan Komunikasi dan Informasi Yang Optimal” : mengandung pengertian bahwa pelayanan komunikasi dan informasi mampu menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Sumbawa Barat dengan mudah dan cepat serta berkualitas.

Kalimat “Ketersedian Data dan persandian Yang Andal” : mengandung pengertian bahwa ketersediaan data dengan persandian merupakan salah satu komponen dalam penyusunan informasi. Oleh karena itu dibutuhkan keandalan atau dapat dipercaya atas keduanya. Dalam rangka mewujudkan visi yang dicanangkan di atas, maka disusunlah Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2017-2021, yaitu sebagai berikut :

1. Mendorong kelancaran dan ketertiban pelayanan administrasi perkantoran
2. Meningkatkan kemudahan akses informasi secara merata
3. Meningkatkan ketersedian data yang valid
4. Meningkatkan keamanan data dan informasi yang andal

**Tabel 5.1**

**Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan SKPD**

**Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan  Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal  Perenca  naan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | | | | | Unit Kerja SKPD Penang  gung Jawab | Lokasi |
| 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | | | |
| Tar  get | Rp juta | Tar  get | Rp juta | Tar  get | Rp juta | Tar  get | Rp juta | Tar  get | Rp juta | | | Tar  get | | Rp juta | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | | | (18) | | (19) | | (20) | (21) |
| Indeks SPBE | persentase SKPD yang sudah memanfaatkan IT dalam pengelolaan pemerintah | jumlah skpd yang memanfaatkan it |  | **PROGRAM Pembuatan Peraturan Tata Kelola SPBE** | **Tersedianya Peraturan Bupati, SOP** |  | 100% | 6.350 | 100 % | 21.827 | 100% | 25 juta | 100% | 26 juta | 100% | 27 juta | | |  | | 1 laporan | | 20 Juta | KSB |
|  |  |
|  | Pembuatan perturan Bupati Tentang Tata Kelola SPBE | Jumlah Peraturan Bupati Tentang Tata Kelola SPBE dan adanya SOP pada setiap tindakan penanganan TIK |  | 1 laporan | 6.350 | 1 Laporan | 8.962 juta | 1 Laporan | 9 juta | 1 Laporan | 10 juta | 1 Laporan | 10 juta | | | 20 Juta | | 1 laporan | | 20 Juta | 1 laporan |
|  | **Program Optimalisasi Penggunaan Jaringan Pita Lebar** | **Persentase penggunaan Jaringan Serat Optik Pada semua OPD** |  | 1 laporan | 6.350 | 1 Laporan | 6,635 | 1 Laporan | 7 juta | 1 Laporan | 7,5 juta | 1 Laporan | 8 juta | | |  | |  | |  |  |
|  | Pelatihan Pemakaian Jaringan Serat Optik di Lingkungan Perkantoran KTC | Rasio Pertukaran Data secara teratur, Print out terintegrasi, Integrasi Aplikasi. |  | 1 laporan | 6.350 | 2 Laporan | 6,5 juta | 2 Laporan | 7 juta | 2 Laporan | 7,5 juta | 2 Laporan | 7,5 juta | | |  | |  | |  |  |
|  |  |  | **Program Pengembangan Aplikasi Informatika terintegrasi** | **Persentase Terintagrasinya Aplikasi** |  | 2 Dok | 7.750 | 5 dok | 22.522 | 5 dok | 23 | 5 dok | 24 | 5 dok | 25 | | |  | |  | |  |  |
|  |  |  | Integrasi Aplikasi OPD dan Desa | Aplikasi terintegrasi dan berada dalam Domain: sumbawabaratkab.go.id |  | 1 laporan | 6.350 | 1 Dokumen | 7,522 Juta | 1 Dokumen | 7,6 Juta | 1 Dokumen | 8 Juta | 1 Dokumen | 8,5 Juta | | |  | |  | |  |  |
|  |  |  | **Program Optimalisasi Pemakaian Sarana Teknologi dan Informatika** | **Persentase pelayanan Administrasi dan pelayanan publik berbasis IT di Desa dan OPD** |  | 4 dokumen | 7,750 juta | 4 dokumen | 15 Juta | 4 dokumen | 16 juta | 4 dokumen | 17 juta | 4 dokumen | 17 juta | | |  | |  | |  |  |
|  |  |  |  | Bimbingan Teknis Pemanfaatan Perangkat IT untuk Pelayanan Administrasi dan Pelayanan Publik | Rasio Meningkatnya kompetensi Petugas IT di OPD dan Desa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | **Program Pengadaan Taman Pintar Digital** | Adanya WIFI bebas bayar di lokasi di Kota Kecamatan |  | I Tahun | 2.942.283.160 | 1 Tahun | 869.390.500 | 100  % | 900 juta | 100% | 900 juta | 100% | 900 juta | | |  | |  | |  | KSB |
|  |  |  |  | Pembangunan Ekosistem Telekomunikasi | Jumlah WIFI bebas Bayar |  | 1 tahun | 388.613.900 | 1 Tahun | 869.390.500 | 100  % | 900 juta | 100% | 900 juta | 100% | 900 juta | | |  | |  | |  |  |
| Membentuk dan meningkatkan kapasitas kelembagaan produsen informasi publik | Tersedianya lembaga-lembaga Pengelola Web, Lembaga Monitoring Media, Dewan Redaksi Konten Pemda dan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan PPID serta Komisi Informasi daearah |  | **PROGRAM Pengembangan Komunikasi Publik** | Persentase Cakupan Keterjangkauan Komunikasi dan Informasi Publik |  | 1 Tahun | 349.106.400 | 1 Tahun | 869.390.500 | 100  % | 900 juta | 100% | 900 juta | 100% | 900 juta | | |  | |  | |  |  |
|  |  |  | Penguatan Kelompok Informasi Masyarakat | Jumlah website dan akun media sosial Terbuat |  | 1 Tahun | 234.950 | 1 Tahun | 372.500 | 1 Tahun | 400 juta | 1 Tahun | 450 juta | 1 Tahun | 500 juta | | |  | |  | |  |  |
|  | Peningkatan Kapasitas Pelaku Informatika | Jumlah Aparatur Informatika Yang Berkompeten |  | 1 Tahun | 349,106 juta | 1 Tahun | 496,890 juta | 1 Tahun | 500 juta | 1 Tahun | 550 juta | 1 Tahun | 550 juta | | |  | |  | |  |  |
|  |  |  |  | Sosialisasi dan Diseminasi Informasi Daerah | Jumlah informasi publik tersebar |  | I Tahun | 454,130 juta | 1 Tahun | 56,709 juta | 1 Tahun | 56,709 juta | 1 Tahun | 56,709 juta | 1 Tahun | 56,709 juta | | |  | |  | |  |  |
|  | Mendorong OPD untuk melakukan pengumpulan Data Sektoral | Meningkatnya Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi yang valid |  | **PROGRAM Pengembangan Data dan Informasi Statistik Sektoral** | Jumlah data sektoral terkumpul |  | 1 Tahun | 234.950 juta | 1 Tahun | 9,435 juta | 1 Tahun | 10 juta | 1 Tahun | 12 juta | 1 Tahun | 15 juta | | |  | |  | |  |  |
|  |  |  | Manajemen Data dan Informasi Statistik Sektoral | Adanya Sistem Informasi Statistik Sektoral |  | 1 Tahun | 48.704.800 juta | 1 Tahun | 25,424 juta | 1 Tahun | 30 juta | 1 Tahun | 50 juta | 1 Tahun | 70 juta | | |  | |  | |  |  |
|  |  |  | Verifikasi Data Statistik Daerah | Jumlah OPD yang dapat diverifikasi datanya meningkat |  | 1 Tahun | 21,000 juta | 1 Tahun | 21,850 juta | 1 Tahun | 31 juta | 1 Tahun | 31 juta | 1 Tahun | 31 juta | | |  | |  | |  |  |
| Terbangunnya sistem pengamanan perangkat lunak yang kuat | Persentase pengamanan sistem informasi Daerah |  | **PROGRAM Pengembangan Sistem Persandian Daerah** | Persentase dokumen yang tersedia |  | 1 laporan | 6.350 | 100% | 9,054 juta | 100% | 10 juta | 100% | 11 juta | 100% | 12 juta | | |  | |  | |  |  |
|  |  |  | Managemen Sistem Persandian | Rasio dokumen yang baik dan dokumen yang rusak |  | 1 laporan | 6.350 | 100% | 9,054 juta | 100% | 10 juta | 100% | 11 juta | 100% | 12 juta | | |  | |  | |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | Pemakaian Tandatangan Elektronik | Persentase pemakaian Tandatangan Elektronik |  | 100% | 37.617 | 100% | 9,054 juta | 100% | 10 juta | 100% | 11 juta | 100% | | 12 juta | |  | | |  |  |  |
|  |  |  | Pemakaian QR Code dan Barcode | Jumlah pemakai QR Code dan Barcode dalam Dokumen Administrasi Publik |  | 1 Tahun | 37.617 | 100% | 9,054 juta | 100% | 10 juta | 100% | 11 juta | 100% | | 12 juta | |  | | |  |  |  |
|  | OPERASIONALISASI JARINGAN KOMUNIKASI SANDI OPD | PERSENTASE PENGELOLAAN JARINGAN KOMUNIKASI |  | 1 tahun | 664.565.800 | 100% | 9,054 juta | 100% | 10 juta | 100% | 11 juta | 100% | | 12 juta | |  | | |  |  |  |
|  | MONEV OPERASIONAL JARINGAN KOMUNIKASI SANDI | PERSENTASE MONEV OPERASIONAL JKS OPD |  | 1 tahun | 664.565.800 | 100% | 9,054 juta | 100% | 10 juta | 100% | 11 juta | 100% | | 12 juta | |  | | |  |  |  |
|  | FASILITAS LAYANAN KEAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH( SERTIFIKAT/TANDATANGAN ELEKTRONIK) | PERSENTASE LAYANAN KEAMANAN INFORMASI PEMDA TERHADAP OPD |  | 1 Tahun | 1.099.489.660 | 100% | 9,054 juta | 100% | 10 juta | 100% | 11 juta | 100% | | 12 juta | |  | | |  |  |  |
|  | Pengamanan Data Informasi Persandian Daerah | Persentase keamanan data informasi opd |  | 1 tahun | 891.242 | 100% | 9,054 juta | 100% | 10 juta | 100% | 11 juta | 100% | | 12 juta | |  | | |  |  |  |
|  | Kontra Penginderaan | Persentase pelayanan kontra pengideraan |  | 1 Tahun | 208.247.660 | 100% | 9,054 juta | 100% | 10 juta | 100% | 11 juta | 100% | | 12 juta | |  | | |  |  |  |
|  | Jamming | % pelayanan jamming |  | 1 Tahun | 208.247.660 | 1 tahun | 249.248 | 1 tahun | 250 juta | 1 tahun | 260 juta | 1 tahun | | 270 juta | |  | | |  |  |  |
|  | Assesment Keamanan Sistem Informasi (penilaian Mandiri) | nilai keamanan informasi |  | 1 Tahun | 208.247.660 | 1 Tahun | 129,897 | 1 Tahun | 135 juta | 1 Tahun | 140 juta | 1 Tahun | | 150 juta | |  | | |  |  |  |
|  | Penyelenggaraan Security Operation center | % OPD yang dilakukan SOC |  | 1 Tahun | 208.247.660 | 1 thn | 119.351 | 1 thn | 150 | 1 thn | 160 | 1 thn | | 170 | |  | | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | Penetration Testing | % OPD yang dilakukan penetration testing |  | 1 Tahun | 208.247.660 | 1 tahun | 3.038.382 | 1 tahun | 4 M | 1 tahun | 4,5 M | 1 tahun | | | 4,5 M | |  |  | |  |  |
|  | Literasi Kemanan Informasi Pemerintah daerah dan publik | Persentase aparatur yang mengikuti kegiatan literasi kemanan informasi |  | 1 Tahun | 208.247.660 | 100% | 2,243 m | 100% | 2,5 M | 100% | 2,5 M | 100% | | | 2,5 M | |  |  | |  |  |
|  | Peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah di Bidang Keamanan Informasi | Persentase aparatur yang mengikuti bimtek/pelatihan/workshop |  | 1 Tahun | 208.247.660 | 1 Keg | 83,532 juta | 1 Keg | 85 | 1 Keg | 90 | 1 Keg | | | 90 | |  |  | |  |  |
|  | Peningkatan kapasitas teknologi kemanan informasi | Persentase kebutuhan perangkat persandian |  | 1 Tahun | 208.247.660 | 1 Keg | 221,980 juta | 1 Keg | 225,000 | 1 Keg | 230 juta | 1 Keg | | | 250 juta | |  |  | |  |  |

**BAB VI**

**2.3 INDIKATOR KINERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika yang menjadi skala prioritas guna menunjang pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD 2017-2021 Kabupaten Sumbawa Barat dapat dilihat dalam tabel 6.1 dibawah ini.

**Tabel 6.1**

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Sumbawa Barat**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Target Kinerja Sasaran Tahun | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 11 | Indeks SPBE | persentase SKPD yang sudah memanfaatkan IT dalam pengelolaan pemerintah | jumlah skpd yang memanfaatkan it |  |  |  |  |  |
|  |  | Membentuk dan meningkatkan kapasitas kelembagaan produsen informasi publik | Tersedianya lembaga-lembaga Pengelola Web, Lembaga Monitoring Media, Dewan Redaksi Konten Pemda dan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan PPID serta Komisi Informasi daearah |  |  |  |  |  |
|  | Mendorong OPD untuk melakukan pengumpulan Data Sektoral | Meningkatnya Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi yang valid |  |  |  |  |  |
|  | Terbangunnya sistem pengamanan perangkat lunak yang kuat | Persentase pengamanan sistem informasi Daerah |  |  |  |  |  |

**Tabel 6.2**

**Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan SKPD**

**Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan  Kegiatan | Indikator tujuan, sasaran, Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal  Perenca  Naan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | Unit Kerja SKPD Penang  gung Jawab | | | Lokasi |
| 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | | | | | | | |
| Tar | Rp juta | Tar | Rp juta | Tar | Rp juta | Tar | Rp juta | Tar | Rp juta | Tar | | | Rp juta | | | | |
| Get | get | Get | get | get | get | | |
| -1 | -2 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 | -18 | | | -19 | | | | | -20 | | | -21 |
| **Indeks SPBE** | **persentase SKPD yang sudah memanfaatkan IT dalam pengelolaan pemerintah** |  | **Program Pembuatan Peraturan Tata Kelola SPBE** | **Tersedianya Peraturan Bupati, SOP** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pembuatan perturan Bupati Tentang Tata Kelola SPBE | Jumlah Peraturan Bupati Tentang Tata Kelola SPBE dan adanya SOP pada setiap tindakan penanganan TIK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **PROGRAM Optimalisasi Penggunaan Jaringan Pita Lebar** | **Persentase penggunaan Jaringan Serat Optik Pada semua OPD** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pelatihan Pemakaian Jaringan Serat Optik di Lingkungan Perkantoran KTC | Rasio Pertukaran Data secara teratur, Print out terintegrasi, Integrasi Aplikasi. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **PROGRAM Pengembangan Aplikasi Informatika terintegrasi** | **Pengembangan Aplikasi Informatika terintegrasi** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Integrasi Aplikasi OPD dan Desa | Aplikasi terintegrasi dan berada dalam Domain: sumbawabaratkab.go.id |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **PROGRAM Optimalisasi Pemakaian Sarana Teknologi dan Informatika** | **Persentase pelayanan Administrasi dan pelayanan publik berbasis IT di Desa dan OPD** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Bimbingan Teknis Pemanfaatan Perangkat IT untuk Pelayanan Administrasi dan Pelayanan Publik | Rasio Meningkatnya kompetensi Petugas IT di OPD dan Desa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **PROGRAM Pengadaan Taman Pintar Digital** | **Adanya WIFI bebas bayar di lokasi di Kota Kecamatan** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pembangunan Ekosistem Telekomunikasi | Jumlah WIFI bebas Bayar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Membentuk dan meningkatkan kapasitas kelembagaan produsen informasi public** |  | **PROGRAM Pengembangan Komunikasi Publik** | **Persentase Cakupan Keterjangkauan Komunikasi dan Informasi Publik** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Penguatan Kelompok Informasi Masyarakat | Jumlah website dan akun media sosial Terbuat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Peningkatan Kapasitas Pelaku Informatika | Jumlah Aparatur Informatika Yang Berkompeten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Sosialisasi dan Diseminasi Informasi Daerah | Jumlah informasi publik tersebar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Mendorong OPD untuk melakukan pengumpulan Data Sektoral** |  | **PROGRAM Pengembangan Data dan Informasi Statistik Sektoral** | **Jumlah data sektoral terkumpul** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Manajemen Data dan Informasi Statistik Sektoral | Adanya Sistem Informasi Statistik Sektoral |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Terbangunnya sistem pengamanan perangkat lunak yang kuat** |  | **PROGRAM Pengembangan Sistem Persandian Daerah** | **Persentase dokumen yang tersedia** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pemakaian Tandatangan Elektronik | Persentase pemakaian Tandatangan Elektronik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pemakaian QR Code dan Barcode | Jumlah pemakai QR Code dan Barcode dalam Dokumen Administrasi Publik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | OPERASIONALISASI JARINGAN KOMUNIKASI SANDI OPD | PERSENTASE PENGELOLAAN JARINGAN KOMUNIKASI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | MONEV OPERASIONAL JARINGAN KOMUNIKASI SANDI | PERSENTASE MONEV OPERASIONAL JKS OPD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | FASILITAS LAYANAN KEAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH( SERTIFIKAT/TANDATANGAN ELEKTRONIK | PERSENTASE LAYANAN KEAMANAN INFORMASI PEMDA TERHADAP OPD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pengamanan Data Informasi Persandian Daerah | Persentase keamanan data informasi opd |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Kontra Penginderaan | Persentase pelayanan kontra pengideraan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Jamming | PERSENTASE pelayanan jamming |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Assesment Keamanan Sistem Informasi (penilaian Mandiri) | nilai keamanan informasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Penyelenggaraan Security Operation center | PERSENTASE OPD yang dilakukan SOC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Penetration Testing | PERSENTASE OPD yang dilakukan penetration testing |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Literasi Kemanan Informasi Pemerintah daerah dan publik | Persentase aparatur yang mengikuti kegiatan literasi kemanan informasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah di Bidang Keamanan Informasi | Persentase aparatur yang mengikuti bimtek/pelatihan/workshop |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Peningkatan kapasitas teknologi kemanan informasi | Persentase kebutuhan perangkat persandian |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Tabel 6.3**

**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

Visi : TERWUJUDNYA PELAYANAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI YANG OPTIMAL DIDUKUNG OLEH KETERSEDIAAN DATA DAN PERSANDIAN YANG ANDAL

Misi I : Mendorong kelancaran dan ketertiban pelayanan administrasi perkantoran

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Tujuan | Sasaran | | Strategi | | Arah Kebijakan | | Kebijakan Umum | |
| (1) | (2) | (3) | | (4) | | (5) | | (6) | |
| 1 | Meningkatnya kualitas dan terwujudnya kuantitas laporan keuangan dan program SKPD yang selaras | 1.1 | Tersedianya laporan keuangan yang tepat waktu | 1.1 | Konsultasi, Evaluasi, Reportasi | 1.1 | Laporan bulanan dan tahunan tepat waktu | 1.1 | Penerapan anggaran berbasis kinerja |
|  |  | 1.2 | Tersusunnya program kegiatan yang terpadu | 1.2 | Konsultasi, Evaluasi, Reportasi | 1.2 | Program kegiatan terpadu | 1.2 | Kerjasama dengan pemerintah propinsi dan pusat |
| 2 | Meningkatnya efektifitas pelayanan perkantoran | 2.1 | Tersedianya perlengkapan dan fasilitas perkantoran yang memadai | 2.1 | Transaksi, Konstruksi dan Rehabilitasi | 2.1 | Sarana perkantoran yang memadai | 2.1 | Kerjasama dengan pihak swasta |
|  |  | 2.2 | Tersedianya data dan informasi yang valid | 2.2 | Inventarisasi, Identifikasi, Evaluasi | 2.2 | Database Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Sumbawa Barat | 2.2 | Kerjasama dengan instansi terkait |
|  |  | 2.3 | Tersedianya laporan kepegawaian tepat sasaran | 2.3 | Konsultasi, Evaluasi, Reportasi | 2.3 | Laporan disiplin kerja pegawai | 2.3 | Penerapan penghargaan dan sanksi |

Misi II : Meningkatkan kemudahan akses informasi secara merata

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Tujuan | Sasaran | | Strategi | | Arah Kebijakan | | Kebijakan Umum | |
| (1) | (2) | (3) | | (4) | | (5) | | (6) | |
| 3 | Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan komunikasi | 3.1 | Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai  Tersedianya tenaga pranata komputer yang terampil | 3.1 | Transaksi, kerjasamaKoordinasi, Edukasi | 3.1 | Tenaga jabatan fungsional dan pelatihan | 3.1 | Kerjasama dengan BUMN, SwastaKoordinasi dengan instansi terkait dan lembaga pelatihan |
|  |  | 3.2 | Tersedianya tenaga pranata computer yang terampil | 3.2 | Koordinasi, Edukasi | 3.2 | Sarana telekomunikasi | 3.2 | Koordinasi dengan instansi terkait dan lembaga pelatihan |
|  |  | 3.3 | Tersedianya peraturan pengelolaan TIK yang jelas | 3.3 | Regulasi, Visitasi, Sosialisasi | 3.3 | Masterplan dan Peraturan Pengelolaan TIK | 3.3 | Kerjasama dengan akademisi, pemerintah pusat, provinsi, daerah dan pelaku usaha bidang komunikasi dan informatika |
|  |  | 3.4 | Tersedianya data informasi pelayanan komunikasi yang valid | 3.4 | Koordinasi, Visitasi | 3.4 | Data menara telekomunikasi dan jenis usaha komunikasi dan informatika | 3.4 | Koordinasi dengan pihak swasta dan pelaku usaha bidang komunikasi dan informatika |
| 4 | Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyebaran informasi | 4.1 | Terbentuk dan terbinanya kelompok informasi masyarakat | 4.1 | Koordinasi, Visitasi, Sosialisasi, Fasilitasi | 4.1 | Kelompok Informasi Masyarakat | 4.1 | Kerjasama dengan pihak kecamatan dan desa |
|  |  | 4.2 | Tersedianya sarana dan prasarana penyebaran informasi yang memadai | 4.2 | Transaksi, Evaluasi | 4.2 | Sarana dan Prasarana Penyebaran Informasi | 4.2 | Kerjasama dengan pihak swasta |

Misi III : Meningkatkan ketersediaan data yang valid

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Tujuan | Sasaran | | Strategi | | Arah Kebijakan | | Kebijakan Umum | |
| (1) | (2) | (3) | | (4) | | (5) | | (6) | |
| 5 | Meningkatnya kualitas data dan informasi | 5.1 | Tersedianya data statistik yang berkualitas | 5.1 | Koordinasi, Fasilitasi, Validasi, Regulasi | 5.1 | -Dokumen statistik sektoral dan dasar  -Verifikasi  -Peraturan Daerah/ Peraturan Bupati | 5.1 | Kerjasama dengan SKPD/ instansi/ lembaga terkait dan BPS |
|  |  | 5.2 | Terwujudnya efektivitas pengolahan data. | 5.2 | Koordinasi, Fasilitasi, Konstruksi | 5.2 | Aplikasi pengolahan data | 5.2 | Kerjasama dengan SKPD/ instansi/ lembaga terkait dan pihak ketiga |
|  |  | 5.3 | Terwujudnya penyebaran dan kemudahan akses terhadap informasi data | 5.3 | Publikasi | 5.3 | Penyebaran data melalui media cetak dan elektronik | 5.3 | Kerjasama dengan SKPD/ instansi/ lembaga terkait dan pihak ketiga |
|  |  | 5.4 | Meningkatnya kemampuan aparatur dalam mengolah data | 5.4 | Sosialisasi | 5.4 | Sumber daya pengelola data | 5.4 | Kerjasama dengan SKPD/ instansi/ lembaga terkait Tingkat Kab./ Prov/ Pusat |
|  |  | 5.5 | Tersedianya informasi atas pelaksanaan kegiatan | 5.5 | Identifikasi, Evaluasi | 5.5 | Pengendalian kegiatan | 5.5 | Kerjasama dengan SKPD/ instansi/ lembaga terkait |

Misi IV : Meningkatkan keamanan data dan informasi yang andal

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Tujuan | Sasaran | | Strategi | | Arah Kebijakan | | Kebijakan Umum | |
| (1) | (2) | (3) | | (4) | | (5) | | (6) | |
| 6 | Meningkatnya kualitas keamanan data dan informasi | 6.1 | Tersedianya sarana dan prasarana persandian yang memadai | 6.1 | Koordinasi, Edukasi | 6.1 | Sarana dan prasarana persandian | 6.1 | Kerjasama dengan SKPD terkait |
|  |  | 6.2 | Tersedianya aparat persandian yang professional | 6.2 | Koordinasi, Edukasi | 6.2 | Tenaga pengelolah persandian | 6.2 | Kerjasama dengan Lemsaneg dan pihak terkait |

**BAB VII**

**PENUTUP**

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2017- 2021 ini berpedoman pada PRJMD Kabupaten Sumbawa Barat yang memuat tentang program, kegiatan dan kebijakan serta tujuan dan sasaran.

Renstra digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana kerja Tahunan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat sebagai pedoman penyusunan Renstra yang akan datang

Selain itu Renstra dipakai sebagai bahan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahuna serta lima tahunan.

Dengan disusunnya rencana strategis tahun 2017-2021 diharapkan menjadi koridor pelaksanaan kegiatan program sehingga dapat mencapai target, Sasaran dan dapat mewujudkan visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika dan sekaligus juga bisa mewujudkan visi dan misi Kabupaten Sumbawa Barat.